



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
INSPEKTORAT DAERAH**

Jl. Harapan Baru Kompleks OPD, Blok C No.17 Pangkajene Sidenreng
Nomor Telepon/ Fax : 0421-3590015, email_inspektoratsidrap@gmail.com
SULAWESI SELATAN

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Tahun Anggaran 2021 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

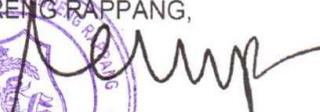
Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Pangkajene Sidenreng, 29 Maret 2021

INSPEKTORAT DAERAH
SIDENRENG RAPPANG,




DR. MUH. ROHADY RAMADHAN, S.IP., M.Si
Pangkat: Pembina Utama Madya
NIP. 19710318 199101 1 003



Kata Pengantar

Dengan memanjatkan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 dapat diselesaikan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara substantif merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang. Selain itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 merupakan media pertanggung jawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018- 2023, hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Sidenreng Raappang tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yaitu masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 ini, bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2021 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pangkajene Sidenreng, 10 Maret 2022

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

H.DOLLAH MANDO



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum Kabupaten.....	2
1.3. Pertumbuhan Ekonomi.....	9
1.4. Kondisi Pemerintahan	10
1.5. Jumlah Aparatur Sipil Negara	14
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis Tahun 2019–2023	16
2.1.1. Visi.....	16
2.1.2. Misi.....	18
2.1.3. Tujuan dan Sasaran.....	19
2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	21
2.3. Perjanjian Kinerja.....	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2021	24
3.2. Analisis Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2021.....	27
3.3. Realisasi Anggaran.....	88
3.4. Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Tahun 2021.....	89
BAB IV PENUTUP.....	94

LAMPIRAN :

1. Pernyataan Telah Direviu Oleh Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021
4. Rencana Kinerja Tahunan 2022 Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang
5. SOP Penyusunan LKjIP Kabupaten Sidenreng Rappang
6. Penghargaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Instruksi Presiden diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 dinyatakan bahwa Azas-azas Umum Penyelenggaraan Negara, meliputi : Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

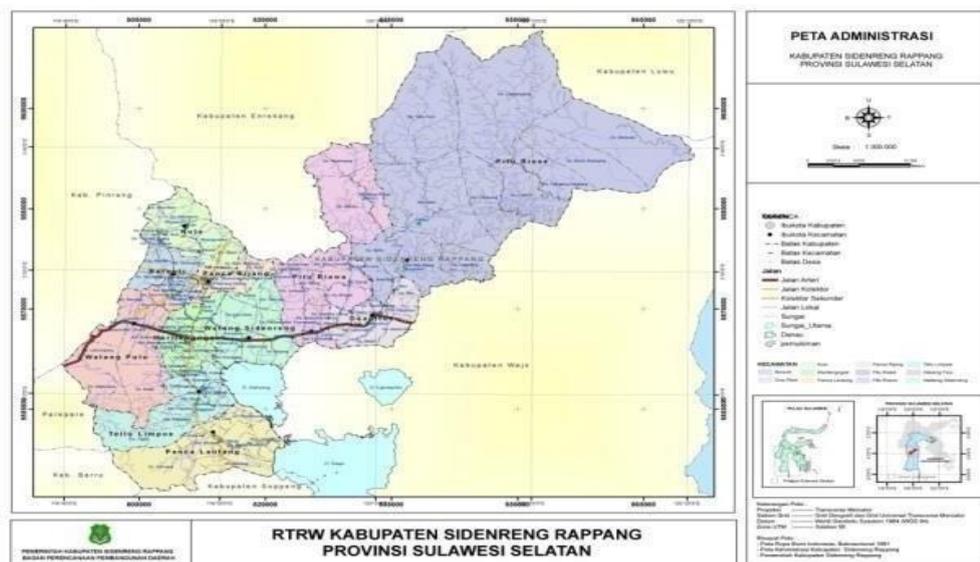
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati / Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah kabupaten / kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggung jawaban kepada publik.



1.2 GAMBARAN UMUM

1.2.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Sidenreng Rappang secara geografis terletak di antara $3^{\circ}43' - 4^{\circ}09'$ Lintang Selatan dan $119^{\circ} 41' - 120^{\circ} 10'$ Bujur Timur kira-kira 183 Km di sebelah Utara Kota Makassar (Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan). Secara umum kondisi kelerengn wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang didominasi oleh daerah yang datar, kondisi lain adalah daerah perbukitan dan yang lebih kecil adalah daerah pegunungan. Letak Kabupaten Sidenreng Rappang berbatasan dengan :



Gambar1.1Peta Administrasi Kabupaten Sidenreng Rappang

- Sebelah Utara : Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Pinrang
- Sebelah Timur : Kabupaten Luwu dan Kabupaten Wajo
- Sebelah Selatan : Kabupaten Barru dan Kabupaten Soppeng
- Sebelah Barat : Kota Parepare dan Kabupaten Pinrang

Wilayah Administrasi Kabupaten Sidenreng Rappang dengan luas 1.883,25KM2 terbagidalam 11 Kecamatan dan 106 Desa/Kelurahan.

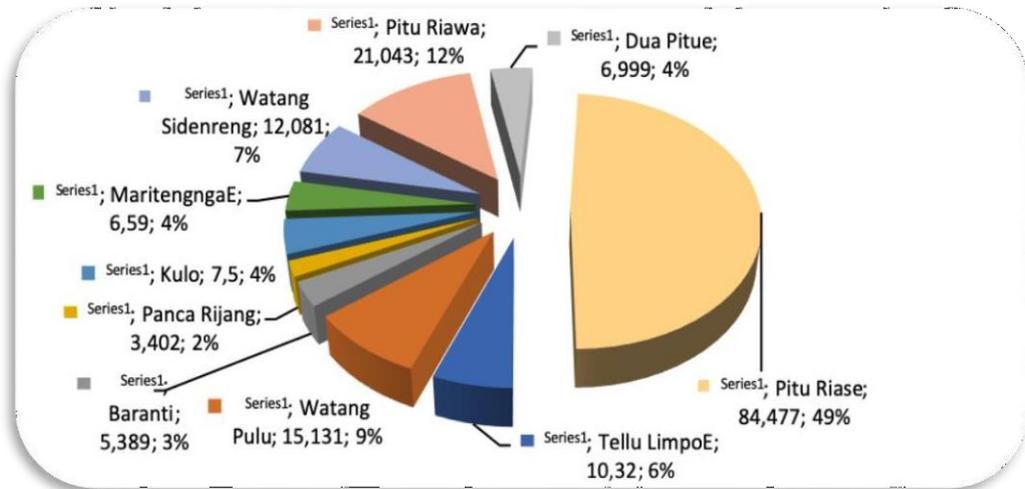


Tabel 1.1
Luas Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang
Menurut Kecamatan (Ha) dan Jumlah
Desa/Kelurahan

No.	Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah Desa/Kelurahan	
			Kelurahan	Desa
1	Panca Lautang	15.393	3	7
2	Tellu LimpoE	10.320	6	3
3	Watang Pulu	15.131	5	5
4	Baranti	5.389	5	4
5	Panca Rijang	3.402	4	4
6	Kulo	7.500	-	6
7	MaritengngaE	6.590	7	5
8	Watang Sidenreng	12.081	3	5
9	Pitu Riawa	21.043	2	10
10	Dua Pitue	6.999	2	8
11	Pitu Riase	84.477	1	11
Jumlah		188.325	38	68

Sumber : BPS Kabupaten Sidenreng Rappang;2017

Berdasarkan informasi pada Tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa dari 11 kecamatan, terlihat bahwa kecamatan terluas adalah Kecamatan Pitu Riase dengan luas 84.477 Ha, sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan MaritengngaE dengan luas 6.590 Ha, secara lebih rinci dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 1.2 Komposisi Pembagian Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang

1.2.2. Kondisi Topografi

Kabupaten Sidenreng Rappang dilihat dari kondisi kelerengan dibagi dalam 4 (empat) kategori yaitu :

- Lereng 0-2% meliputi 42,80% dari luas Kabupaten Sidenreng Rappang atau sekitar 80.611 Ha, kelerengan ini tersebar di seluruh kecamatan. Jenis penggunaannya adalah sawah, perkebunan rakyat, kolam masyarakat dan perkampungan, Kecamatan yang mempunyai lereng 0–2% paling luas adalah Kecamatan Watang Sidenreng yaitu 11.385 Ha atau 14,12 % dari luas areal yang berlereng 0-2% dan yang tersempit adalah Kecamatan Panca Rijang seluas 3.402 Ha (4,22%) luas areal yang berlereng 0–2 %.
- Lereng 2-15 % meliputi 4,6% dari luas Kabupaten Sidenreng Rappang atau sekitar 8.790 Ha, kelerengan ini tersebar hanya tersebar pada 5 (lima) Kecamatan, kelerengan ini baik dimanfaatkan untuk tanaman pertanian dengan tetap memperhatikan usaha pengawetan tanah dan air. Jenis penggunaan saat ini adalah sawah, perkebunan rakyat, hutan dan sebagian kecil perkampungan, Kecamatan yang mempunyai lereng 2–15% paling luas adalah Pitu Riase seluas 3.457 Ha (39,33%), Watang Pulu seluas 2.306 Ha atau 26,23%, Panca Lautang seluas 1.389 Ha (15,80), Pitu Riawa seluas 923 Ha (10,55%) dan Tellu LimpoE seluas 715 Ha atau 8,13%. Sedangkan Kecamatan Baranti, Panca Rijang, Kulo, MaritengngaE, Watang Sidenreng dan Dua pituE tidak terdapat jenis kelerengan ini. Lereng 15-40 % meliputi 16,68% dari luas Kabupaten Sidenreng Rappang atau sekitar 31,414 Ha, kelerengan ini tersebar hanya tersebar pada 5 (lima) Kecamatan, kelerengan ini masih cukup baik dimanfaatkan untuk usaha pertanian dan



perkebunan dengan tetap memperhatikan usahapengawetan tanah dan air. Jenis penggunaan saat ini adalah perkebunan rakyat, hutan dan sebagian kecil perkampungan dan persawahan, Kecamatan yang mempunyai lereng 15-40% paling luas adalah Kecamatan Pitu Riase seluas 20.483 Ha (65,20%), Panca Lautang seluas 3.573 Ha atau 11,37%, Pitu Riase seluas 3.456Ha (11%), Tellu LimpoE mempunyai luas dengan kelerengan 15-40%2.244 Ha (7,14%) dan Kecamatan Wattang Pulu seluas 1.658Ha (5,28%). Sedangkan Kecamatan Baranti, Panca Rijang, Kulo, MaritengngaE, Watang Sidenreng dan Dua PituE tidak terdapat jenis kelerengan ini.

- Lereng di atas 40 % meliputi 34,31% dari luas Kabupaten Sidenreng Rappang atau sekitar 64.614 Ha. Daerah ini merupakan daerah yang harus dihutankan agar dapat berfungsi sebagai pelindung hidrologis serta menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan hidup, kelerengan ini tersebar hanya tersebar pada 5 (lima) kecamatan. Jenis penggunaan saat ini adalah perkebunan, sebagian besar hutan lindung dan tanah yang rusak (kritis), kecamatan yang mempunyai lereng diatas 40% paling luas adalah Kecamatan Pitu Riase seluas 50.811 Ha (78,64%), Pitu Riawa seluas 7.592 Ha (11,75%), Tellu LimpoE mempunyai luas 2.524 Ha (3,91 %), Panca Lautang seluas 2.138 Ha atau 3,31%, dan Kecamatan Watang Pulu seluas 1.549 Ha (2,04%).

Kondisi topografi untuk wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang bervariasi dengan daratan tertinggi adalah Kecamatan Pitu Riase dengan ketinggian rata-rata 1000 M diatas permukaan laut (dpl), dan dataran terendah adalah Kecamatan Maritengngae, Panca Rijang, Baranti dengan ketinggian rata-rata mulai dari 0-25M dpl.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang tersebar di 11 (sebelas) Kecamatan adalah tanah datar, disusul keadaan tanah bergunung, kemudian berbukit dan terakhir adalah Rawa Danau. Khusus Kecamatan Baranti, Maritengngae dan Dua PituE kondisi topografi 100% tanah datar, sedangkan Kecamatan Panca Lautang, Tellu LimpoE, Watang Pulu dan Pitu Riase didominasi keadaan tanah bergunung. Kondisi Topografi Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 22
Keadaan Topografi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018

No	Kecamatan	Keadaan Tanah (%)				
		Datar	Berbukit	Bergunung	Rawa / Danau	Total
1	Panca Lautang	15	25	57	3	100
2	Tellu LimpoE	15	35	49	1	100
3	Watang Pulu	25	5	70	-	100
4	Baranti	100	-	-	-	100
5	Panca Rijang	97	3	-	-	100
6	Kulo	90	5	5	-	100
7	MaritengngaE	100	-	-	-	100
8	Watang Sidenreng	85	15	-	-	100
9	Pitu Riawa	60	10	30	-	100
10	Dua Pitue	100	-	-	-	100

Sumber: BPS Kabupaten SidenrengRappang; 2018

1.2.3. Kondisi Pengguna Lahan

Sumber daya lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat terlihat dari kondisi tutupan lahan atau pemanfaatan lahan yang terbentuk. Pada dasarnya pembentukan pola pemanfaatan lahan dipengaruhi oleh faktor fisik lahan seperti letak geografis, struktur geologi dan tanah, klimatologi wilayah, dan sektor kegiatan ekonomi masyarakat. Pemanfaatan lahan yang terbentuk hingga saat ini di Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri atas Sawah, Pemukiman, Kebun Campur, Ladang, Kolam/Tambak/Rawa, Danau/Sungai, Perkebunan Rakyat, Hutan, Lapangan Olahraga, Semak/Belukar.

Penggunaan lahan didominasi oleh Kawasan Hutan dengan luas 82.669,05Ha atau mencapai 43,89% dari total luas wilayah Kabupaten sebesar 188.325 Ha, dan Persawahan dengan luas 38.98 9,58 Ha atau sebesar 20,70% dari luas kabupaten. Khusus untuk kawasan permukiman dengan luas 5.989,95(3,18%) dengan luas permukiman yang paling besar berada di Kecamatan Maritengngae dengan luas 1.154,57 Ha dan yang paling kecil Kecamatan Baranti dengan luas 282,58 Ha. Secara lengkap struktur penggunaan lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut:



Penggunaan Lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang

NO	PERUNTUKAN KAWASAN BUDIDAYA	LUAS LAHAN (Ha)
1	Sawah	38.989,58
2	Permukiman	5.989,95
3	Kebun Campur	22.403,32
4	Ladang/Tegalan	2.487,02
5	Kolam/Tambak/Rawa	265,10
6	Danau/Sungai	5.867,86
7	Perkebunan Rakyat	9.323,65
8	Hutan	82.669,05
9	Lapangan Olahraga	5,83
10	Semak/Belukar	20.323,64
	Total	188.325,00

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2018

1.2.4 Aspek Demografi

Jumlah penduduk merupakan salah satu potensi oleh suatu daerah dalam menyediakan tenaga kerja dengan kriteria keahlian yang dibutuhkan untuk melaksanakan proses pembangunan. Potensi demografi ini harus dapat diimbangi dengan kualitas kehidupan yang baik agar jumlah penduduk yang besar tersebut tidak menjadi beban tetapi membantu mengatasi berbagai permasalahan sosial ekonomi disuatu daerah termasuk di Kabupaten Sidenreng Rappang. Untuk lebih jelasnya disajikan pada tabel berikut:



Tabel 1.4

Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan (Jiwa) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017

NO.	KECAMATAN	TAHUN									
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Panca Lautang	16,948	17,071	17,241	17,339	17,442	18,113	17,277	17,242	17,203	17,151
2	Tellu Limpoe	21,356	21,511	22,728	22,871	23,089	23,415	23,456	23,582	23,700	23,812
3	Watang Pulu	25,772	25,959	30,128	30,582	30,947	31,590	33,420	34,235	35,061	35,904
4	Baranti	26,378	26,569	28,068	28,369	28,522	28,997	29,476	29,763	30,045	30,313
5	Panca Rijang	25,077	25,258	27,086	27,332	27,613	28,195	28,173	28,383	28,584	28,779
6	Kulo	10,583	10,660	11,345	11,462	11,586	11,831	11,917	12,031	12,147	12,256
7	Maritenggae	40,473	40,767	46,139	46,643	47,203	48,197	48,955	49,563	50,172	50,767
8	Watang Sidenreng	15,616	15,729	17,051	17,203	17,395	17,762	17,605	17,703	17,805	17,893
9	Pitu Riawa	24,038	24,212	24,980	25,213	25,473	26,210	25,831	25,984	26,132	26,269
10	Dua Pitue	26,151	26,340	27,272	27,549	27,865	28,252	28,513	28,775	29,040	29,300
11	Pitu Riase	18,274	18,407	19,873	20,089	20,316	20,745	21,987	22,526	23,096	23,681
	Jumlah	250,666	252,483	271,911	274,652	277,451	283,307	286,610	289,787	292,985	296,125



1.3. Pertumbuhan Ekonomi

Dalam proses pembangunan ekonomi, perubahan struktur ekonomi merupakan hal yang penting. Kontribusi masing-masing sektor pembentuk PDRB mungkin saja akan bervariasi dari waktu ke waktu. Untuk melaksanakan pembangunan dengan sumber daya yang terbatas sebagai konsekuensinya harus difokuskan kepada pembangunan sektor-sektor yang memberikan dampak pengganda (*multiplier effect*) yang besar terhadap sektor-sektor lainnya atau perekonomian secara keseluruhan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam melihat pergerakan perekonomian daerah. Oleh karena itu, indikator pertumbuhan ekonomi selalu menjadi acuan awal dalam memetakan kebijakan-kebijakan strategis terkait peningkatan kualitas perekonomian daerah, tak terkecuali Kabupaten Sidenreng Rappang.

Jika melihat perbandingan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan, Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki pertumbuhan ekonomi pada kategori rendah dengan capaian 7,11 persen dengan peringkat ke-16 dalam lingkup provinsi. Angka ini berada di bawah angka pertumbuhan ekonomi provinsi yang mencapai 7,23 persen pada tahun 2017 ini. Sebaiknya, potensi yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat meningkatkan posisi pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, permasalahan perekonomian harus diupayakan untuk melihat sektor-sektor strategis dan potensial untuk mendorong roda perekonomian daerah. Pada negara berkembang, kontribusi sektor industri harus memegang peranan yang penting, karena sektor industri sampai saat ini mampu memberikan dampak pengganda terhadap perekonomian. Kegiatan perekonomian daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dominan pada sector pertanian. Selain aspek perekonomian yang perlu dikembangkan, pembangunan daerah perlu juga memperhatikan aspek sosial dan budaya untuk menyeimbangkan kehidupan yang berbudi dan pekerti yang luhur serta mulia.

Pembangunan merupakan proses perubahan yang direncanakan dan merupakan suatu kegiatan yang berkesinambungan, berkelanjutan dan bertahap ketingkat yang lebih maju dan lebih baik. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pembangunan harus dilakukan secara bertahap di segala bidang/sektor maupun sub sektor secara terencana dan terprogram. Salah satu cara mencapai keberhasilan pembangunan adalah dengan adanya pembangunan ekonomi. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang menjadi pusat perhatian dalam pembangunan nasional, khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan



dan pemanfaatan hasil-hasil strategis terutamayang menyangkut komoditas pangan. Pengelolaan dan pemanfaatan hasil- hasil produk pertanian ini diharapkan dapat dilakukan secara lebih terencana dengan pemanfaatan yang optimum serta dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat.

Indikator pembangunan ekonomi daerah tercermin dalam perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun ke tahun. Perkembangan PDRB tersebut akan bermanfaat dalam perencanaan pembangunan. Sektor pertanian sendiri merupakan sektor yang memberikan kontribusi cukup besar dalam pembangunan perekonomian. Perkembangan dan Pertumbuhan Atas Sektor PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019- 2023.

1.4. Kondisi Pemerintah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah dilakukan penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Susunan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
- c. Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A yang melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahandaerah;
- d. Dinas Daerah, terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan Dinas Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidangpendidikan dan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
 2. Dinas Kepemudaan, Olah raga dan Pariwisata merupakan Dinas Tipe B yang Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga dan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
 3. Dinas Kesehatan , Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan Dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;



4. Dinas Sosial merupakan Tipe C Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang social;
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan Tipe A menyelenggarakan dan desa, urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
6. Satua Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Merupakan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintah bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub ketentraman dan ketertiban umum serta suburusan kebakaran;
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu merupakan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
8. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
9. Dinas perdagangan dan Perindustrian merupakan Tipe B Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
10. Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan persandian;
11. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup merupakan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan pemerintahan bidang pertanahan, urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
12. Dinas Pekerjaan Umum, penata Ruang dan Perhubungan merupakan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
13. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air merupakan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum;
14. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan merupakan Tipe A yang Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, urusan bidang ketahanan pangan dan urusan pemerintahan bidang perikanan;
15. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan Tipe B yang menyelenggarakan



urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;

e. Badan Daerah, terdiri dari:

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjaang perencanaan, dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
2. Badan Pengelolah Keuangan Daerah merupakan Badan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan Daerah;
3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah merupakan Tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian pendidikan dan pelatihan;
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Tipe A;
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

f. Kecamatan, terdiri dari:

1. Kecamatan Panca Lautang merupakan Kecamatan Tipe A;
2. Kecamatan Tellu Limpoe merupakan Kecamatan Tipe A;
3. Kecamatan Watang Pulu merupakan Kecamatan Tipe A;
4. Kecamatan Baranti merupakan Kecamatan Tipe A;
5. Kecamatan Panca Rijang merupakan Kecamatan Tipe A;
6. Kecamatan Kulo merupakan Kecamatan Tipe A;
7. Kecamatan Maritengngae merupakan Kecamatan Tipe A;
8. Kecamatan Watang Sidenreng merupakan Kecamatan Tipe A;
9. Kecamatan Pitu Riawa merupakan Kecamatan Tipe A;
10. Kecamatan Dua Pitue merupakan Kecamatan Tipe A;
11. Kecamatan Pitu Riase merupakan Kecamatan Tipe A;



Tabel 1.5
Urusan Pemerintahan Berdasarkan
Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014
Yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO	URUSAN WAJIB (PELAYANAN DASAR)	KETERANGAN
1	Pendidikan	Pendidikan Dasar, PAUD dan Non Formal
2	Kesehatan	-
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;	-
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-
5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	-
6	Sosial	-
	URUSAN WAJIB (NON PELAYANAN DASAR)	
1	Tenaga Kerja	-
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-
3	Pangan	-
4	Pertanahan	-
5	Lingkungan Hidup	-
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-
9	Perhubungan	-
10	Komunikasi dan Informatika	-
11	Koperasi, usaha kecil, dan menengah	Koperasi dan Usaha Mikro
12	Penanaman Modal	-
13	Kepemudahaan dan Olah Raga	-
14	Statistik	-
15	Persandian	-
16	Kebudayaan	-
17	Perpustakaan	-
18	Kearsipan	-



	URUSAN PILIHAN	
1	Kelautan dan Perikanan	Perikanan
2	Pariwisata	-
3	Pertanian	-
4	Perdagangan	-
5	Kehutanan	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten
6	Energi dan Sumber Daya Meneral	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah Kabupaten
7	Perindustrian	-
8	Transmigrasi	-

1.5 Jumlah Aparatur Sipil Negara

a) Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Tabel 1.6

Jumlah PNS Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-Laki	1.978	39,27%
2.	Perempuan	3.058	60,72%
	Total	5.036	100%

Sumber : BKD Kab.Sidrap keadaan Desember 2019

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa PNS didominasi oleh perempuan sebanyak 3.056 orang atau 60,72% sedangkan laki-laki sebanyak 1.918 orang atau 38,28% dari total PNS yang ada.



b) Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.7
Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah PNS	
		Jumlah	Persentase %
1	S.3	2	0.03%
2	S.2	563	11.18%
3	S.1	3.174	63.03%
4	D.IV	97	1.93%
5	D.III	463	9.19%
6	D.II	48	0.96%
7	D.I	10	0.19%
8	SLTA	635	12.62%
9	SLTP	35	0.70%
10	SD	9	0.17%
	Total	5.036	100%

Sumber : BKD Kab.Sidrap Keadaan Desember 2019



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Startegis Tahun 2019-2023

Dokumen Perencanaan jangka Menengah Pemerintah Daerah (5 tahun) atau yang disebut dengan Rencana Strategis merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah. Perencanaan strategis juga merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis, baik lokal, nasional mau pun global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 - 2023 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

2.1.1. Visi

Berdasarkan kondisi Kabupaten Sidenreng Rappang dewasa ini, serta peluang, tantangan dan isu strategis yang akan dihadapi dalam 5 tahun mendatang, pasangan H. DOLLAH MANDO (Bupati) – H.MAHMUD YUSUF (Wakil Bupati) membuat Visi Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018 – 2023 sebagai berikut :

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG SEBAGAI DAERAH
AGRIBISNISYANG MAJU DENGAN MASYARAKAT RELIGIUS, AMAN, ADIL DAN
SEJAHTERA”**

Rumusan visi tersebut mencakup lima pokok visi yakni “Sidenreng Rappang Daerah Agribisnis yang Maju”, dengan masyarakat yang Religius, Aman, Adil dan Sejahtera.



Kelima pokok visi tersebut, yang menjadi fokus gerakan pembangunan dengan "Sidenreng Rappang" yang dicita-citakan dan diharapkan kedepan, sebagai berikut:

Tabel 2.1
Pernyataan Visi, Pokok Visi dan Penjelasan Visi

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Pokok Visi
Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil dan Sejahtera	Agribisnis yang maju	Berkembangnya Sidenreng Rappang menjadi daerah yang berbasis usaha pertanian terpadu, modern, dan berkelanjutan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidenreng Rappang.
Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Pokok Visi
	Religius	Terwujudnya masyarakat Sidenreng Rappang menjadi insan yang bertaqwa, berperilaku taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki karakter teguh terhadap nilai-nilai agama, bersikap toleran dan menjalin kerukunan hidup dengan pemeluk agama lain, serta kepekaan sosial yang tinggi.
	Aman	Terwujudnya kehidupan sosial masyarakat Sidenreng Rappang yang tenteram dan kondusif yang ditandai dengan menurunnya angka kriminalitas.
	Adil	Terbangunnya Kabupaten Sidenreng Rappang tanpa diskriminasi yang ditandai dengan adanya pemberian kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sehingga terwujud pemerataan pembangunan yang berkeadilan.
	Sejahtera	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat Sidenreng Rappang yang ditandai dengan meningkatnya IPM, pendapatan masyarakat, menurunnya angka kemiskinan dan ketimpangan, serta terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat, baik material maupun non material.



2.1.2 Misi

Misi berarti serangkaian tujuan terukur dan terstruktur dalam upaya mewujudkan visi. Untuk mewujudkan visi tersebut maka upaya yang hendak dijalankan dinyatakan dalam rumusan misi sebagai berikut:

1. Memajukan dan meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan dan pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat.
2. Memajukan usaha agribisnis, UMKM dan industri pengolahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Mengembangkan kerjasama investasi daerah dan penyediaan lapangan kerjabaru.
4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah yang merata dan berwawasan lingkungan.
5. Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan good governance dan electronic governance.
6. Mengembangkan dan memajukan kawasan pedesaan melalui penerapan desa cerdas, sehat dan mandiri.
7. Memajukan dan menciptakan kondisi kehidupan beragama serta meningkatkan kualitas budaya lokal sebagai basis nilai dalam menciptakan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif.

2.1.3 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang ditetapkan 7 (tujuh) tujuan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.2
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategis

Visi: Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis yang Maju dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil dan Sejahtera			
No	Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi – 1 Memajukan dan Meningkatkan Kinerja Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan dalam Rangka Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			



1	Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas SDM yang inklusif dan berdaya saing	Sasaran 1 : Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan.	1. Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan, meningkatkan kualitas SDM dan pemerataan tenaga pendidik dan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan
		Sasaran 2 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.	2. Meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan, meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, menciptakan pemerataan tenaga kesehatan yang berkualitas diiringi dengan penerapan pola hidup bersih dan sehat dalam masyarakat.
		Sasaran 3 : Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan	3. Meningkatkan peran kelembagaan PUG dan forum anak, menyebarkan informasi kesetaraan gender dan urgensi perlindungan perempuan dan anak, serta meningkatkan keberdayaan perempuan dalam perekonomian.
Misi – 2 Memajukan Usaha Agribisnis, UMKM dan Industri Pengolahan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.			
2	Tujuan 2 : Meningkatkan pendapatan masyarakat	Sasaran 4 : Meningkatnya produktivitas sektor-sektor perekonomian daerah.	4. Meningkatkan daya saing produk pertanian terpadu berbasis petik, olah, kemas dan jual disertai dengan penguatan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha serta pemenuhan sarana dan prasarana pertanian
		Sasaran 5 : Menurunnya tingkat kemiskinan.	5. Meningkatkan keterpenuhan hak dasar dan keberdayaan penduduk miskin serta meningkatkan pendapatan kelompok penduduk terbawah dengan memperluas skema perlindungan dan bantuan sosial.
		Sasaran 6 : Menurunnya ketimpangan distribusi pendapatan.	
No	Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi – 3 Mengembangkan Kerjasama Investasi Daerah dan Penyediaan Lapangan Kerja Baru			



3	Tujuan 3 : Meningkatkan Penyerapan tenaga kerja	Sasaran 7 : Meningkatnya pertumbuhan investasi dan daya saing daerah	6. Meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan investasi serta daya saing pariwisata.
Misi – 4 Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Merata dan Berwawasan Lingkungan.			
4	Tujuan 4 : Meningkatkan Pembangunan Infrastuktur daerah yang berwawasan lingkungan	Sasaran 8 : Meningkatnya ketersediaan infrastruktur daerah yang berkualitas.	7. Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan Infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, serta permukiman dan perumahan dengan memanfaatkan berbagai sumber pembiayaan.
		Sasaran 9 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	8. Memelihara daya dukung dan daya tampung lingkungan serta meningkatkan kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim dan bencana.
Misi – 5 Mengoptimalkan Kinerja, Kualitas dan Profesionalitas Birokrasi Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik Melalui Penerapan <i>Good Governance</i> dan <i>Electronic Government</i>			
	Tujuan 5 : Meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Sasaran 10 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.	9. Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur, penataan kelembagaan,serta Meningkatkan sistem Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah
		Sasaran 11 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik	10. Meningkatkan kualitas SDM dalam pelayanan publik, penyederhanaan prosedur pelayanan publik serta pengembangan inovasi daerah
		Sasaran 12 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis Elektonik	11. Meningkatkan kualitas infrastuktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam tata kelola pemerintahan
Misi – 6 Mengembangkan Dan Memajukan Kawasan Pedesaan Melalui Konsep Desa Cerdas (Smart Village), Sehat Dan Mandiri.			



6	Tujuan 6 : Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat desa	Sasaran 13 : Terwujudnya desa maju dan mandiri.	12. Meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa
Misi – 7 Memajukan dan Menciptakan Kondisi Kehidupan Beragama Serta Meningkatkan Kualitas Budaya Lokal Sebagai Basis Nilai Dalam Menciptakan Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Yang Kondusif.			
7	Tujuan 7 : Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban serta Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius dan Berbudaya	Sasaran 14 : Meningkatnya kenyamanan kehidupan bermasyarakat	13. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum melalui pengawasan, pengendalian disertai dengan pendekatan sosial kemasyarakatan.

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Adapun Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana berikut :

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal 2019	Target Kinerja Tahun ke-				Kondisi Akhir Periode RPJMD 2023
				2020	2021	2022	2023	
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	71,05	71,21	71,37	71,73	72,18	72,18
2	Indeks Pendidikan	Indeks	62,02	62,05	62,29	62,96	63,93	63,93
3	Indeks Kesehatan	Indeks	76,29	76,66	76,85	77,12	77,34	77,34
4	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	56,80	56,86	57,67	58,84	59,01	59,01
5	PDRB Perkapita	Juta Rupiah	46,01	46,16	46,49	48,76	51,26	51,26
6	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,65	-0,59	3,38-4,51	4,39-5,86	4,51-6,01	4,51-6,01
7	Tingkat kemiskinan	%	4,79	5,05	5,01	4,11	3,17	3,17
8	Gini Ratio	Poin	0,284	0,349	0,342	0,335	0,328	0,328
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,75	5,91	5,88	5,76	5,65	5,65
10	Nilai Investasi	Rp. Triliun	3.235,98	3.449,96	3.615,32	3.780,68	3.946,04	3.946,04
11	Pertumbuhan PDRB Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Transportasi dan Pergudangan, serta Konstruksi (ADHK)	%	9,21	1,67	2,00 -3,91	3,91-5,81	5,81- 7,71	5,81-7,71
12	Indeks Layanan Infrastruktur	Indeks	66,75	67,76	71,89	74,55	77,22	77,22
13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	66,53	65,54	66,26	66,91	67,48	67,48
14	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	30,02 (C)	47,12 (C)	53,08 (CC)	62,87 (B)	71,11 (BB)	71,11 (BB)
15	Nilai SAKIP	Poin	55,33 (CC)	60,03 (B)	65,19 (B)	71,46 (BB)	78,78 (BB)	78,78 (BB)
16	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	74,58 (C)	76,96 (B)	80,14 (B)	84,32 (B)	88,35 (A)	88,35(A)
17	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik(SPBE)	Indeks	1,91	2,13	2,20	2,38	2,60	2,60



18	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,6479	0,6583	0,7278	0,7527	0,7854	0,7854
19	Persentase Desa Maju dan Mandiri	%	8,823	45,59	67,47	75,00	85,29	85,29
20	Angka Kriminalitas	Kasus	474	367	355	347	339	339
21	Angka Kriminalitas yang Tertangani	%	73,63	59,95	73,80	74,93	76,11	76,11

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
3. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah;
4. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas SDM yang Inklusif dan berdaya saing	1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	71,37
2	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan.	2 Indeks Pendidikan.	Indeks	62,54
3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.	3 Indeks Kesehatan.	Indeks	76,85
4	Meningkatnya Keberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan	4 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	57,67
5	Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	5 PDRB Perkapita AHB	Juta Rupiah	46,49
6	Meningkatnya Produktifitas Sektor-Sektor Perekonomian	6 Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3,38-4,51
7	Menurunnya Angka Kemiskinan	7 Tingkat Kemiskinan	Persen	5,01



8	Menurunnya Ketimpangan Distribusi Pendapatan	8	Gini Ratio	Point	0,342
9	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	9	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,88
10	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan Daya Saing Daerah	10	Nilai Investasi	Triliun Rp.	3.615,32
11	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan	11	Pertumbuhan PDRB Sektor Pengadaan Sampah dan Daur Ulang, Transportasi dan Pergudangan, serta Konstruksi (ADHK)	Persen	2,00-3,91
12	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.	12	Indeks Layanan Infrastruktur	Indeks	71,89
13	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	66,26
14	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	14	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	53,08 (CC)
15	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	15	Nilai SAKIP	Point	65,19 (B)
16	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	16	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	80,14 (B)
17	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	17	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,20
18	Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	18	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,7278
19	Terwujudnya Desa Maju dan Mandiri	19	Persentase Desa maju dan mandiri (IDM)	Persen	67,47
20	Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	20	Angka Kriminalitas	Kasus	355
21	Meningkatnya Kenyamanan Kehidupan Bermasyarakat	21	Angka Kriminalitas Tertangani	Persen	73.8



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Sidenreng Rappang tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang dilaksanakan. Dari Perencanaan yang sudah dibuat kemudian dikukuhkan dalam Perjanjian Kinerja selanjutnya setelah tahun anggaran berakhir maka apa yang sudah direncanakan dan diperjanjikan harus diukur dan dilaporkan sebagai bentuk pertanggung jawaban publik.

3.1 CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban mempertanggungjawabkan amanah tersebut. Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing - masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang 2018-2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Berpedoman pada ketentuan yang berlaku, Kinerja Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan tingkat pencapaian sasaran, indikator sasaran dan menggambarkan pula tingkat capaian pada program / kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program / kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut



dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja
berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi kinerja
1	91 % ≤	Sangat Tinggi
2	76 % sd. 90 %	Tinggi
3	66 % sd. 75 %	Sedang
4	51 % sd. 65 %	Rendah
5	50 %	Sangat Rendah

Secara umum Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2023.

Tabel 3.2
Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No.	Kategori	Jumlah Indikator Sasaran	Persentase
Misi I (4 Indikator Sasaran)			
1	Sangat Tinggi	3	100
2	Tinggi	0	0
3	Sedang	0	0
4	Rendah	0	0
5	Sangat Rendah	1	58
	Jumlah	3	87.5
Misi II (4 Indikator Sasaran)			
1	Sangat Tinggi	4	100
2	Tinggi	0	0



3	Sedang	0	0
4	Rendah	0	0
5	Sangat Rendah	0	0
	Jumlah rata-rata	4	100
Misi III (2 Indikator Sasaran)			
1	Sangat Tinggi	0	0
2	Tinggi	1	84
3	Sedang	0	0
4	Rendah	0	0
5	Sangat Rendah	1	0.928
	Jumlah rata-rata	2	42.46
Misi IV (3 Indikator Sasaran)			
1	Sangat Tinggi	3	100
2	Tinggi	0	0
3	Sedang	0	0
4	Rendah	0	0
5	Sangat Rendah	0	0
	Jumlah rata-rata	3	100
Misi V (4 Indikator Sasaran)			
1	Sangat Tinggi	2	100
2	Tinggi	2	85
3	Sedang	0	0
4	Rendah	0	0
5	Sangat Rendah	0	0
	Jumlah rata-rata	4	90
Misi VI (2 Indikator Sasaran)			
1	Sangat Tinggi	2	100
2	Tinggi	0	0
3	Sedang	0	0
4	Rendah	0	0
5	Sangat Rendah	0	0
	Jumlah	2	100
Misi VII (1 Indikator Sasaran)			
1	Sangat Tinggi	2	100
2	Tinggi	0	0



3	Sedang	0	0
4	Rendah	0	0
5	Sangat Rendah	0	0
Jumlah rata-rata		2	100

Hasil analisis pencapaian Pengukuran Kinerja terhadap 21 (empat belas) Sasaran Strategis dan 21 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama, diketahui bahwa 16 indikator sasaran atau 106.37% bermakna Sangat Tinggi, 3 indikator sasaran atau 84.6 % bermakna Tinggi, 1 indikator sasaran atau 58% bermakna rendah dan 1 indikator sasaran atau 9.28% bermakna Sangat Rendah. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 96.18%, dan dikriteria Sangat Tinggi. Capaian kinerja tahun 2020 sebesar 69.76 dengan makna Sedang, dibandingkan pada tahun 2021 bermakna Sangat Tinggi, mengalami peningkatan sebesar 26,42% dibandingkan capaian kinerja tahun lalu.

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA PEMERINTAHAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Tahun 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Kualitas SDM yang Inklusif dan berdaya saing	1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	71,37	71.54	100
2	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan.	2 Indeks Pendidikan.	Indeks	62.54	62.44	99
3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.	3 Indeks Kesehatan.	Indeks	76,85	76,94	100
4	Meningkatnya Keberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan	4 Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	57,67	33.21	58
5	Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	5 PDRB Perkapita AHB	Juta Rupiah	46,49	47.19	102
6	Meningkatnya Produktifitas Sektor-Sektor Perekonomian	6 Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3,38-4,51	5.54	3123
7	Menurunnya Angka Kemiskinan	7 Tingkat Kemiskinan	Persen	5,01	5.04	100
8	Menurunnya Ketimpangan Distribusi Pendapatan	8 Gini Ratio	Point	0,342	0,358	105
9	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	9 Tingkat Pengangguran	Persen	5,88	4.93	84



			Terbuka				
10	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan Daya Saing Daerah	10	Nilai Investasi	Triliun Rp.	3.615,32	323.553	9
11	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan	11	Pertumbuhan PDRB Sektor Pengadaan Sampah dan Daur Ulang, Transportasi dan Pergudangan, serta Konstruksi (ADHK)	Persen	2,00-3,91	6.29	161
12	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.	12	Indeks Layanan Infrastruktur	Indeks	71,89	76.23	106
13	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	66,26	65.01	98
14	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	14	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	53,08 (CC)	47.12 (C)	89
15	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	15	Nilai SAKIP	Point	65,19 (B)	60.03 (B)	92
16	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	16	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	80,14 (B)	78,31	98
17	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	17	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,20	1.78	81
18	Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	18	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,7278	0.7278	100
19	Terwujudnya Desa Maju dan Mandiri	19	Persentase Desa maju dan mandiri (IDM)	Persen	67,47	70.59	105
20	Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	20	Angka Kriminalitas	Kasus	355	400	113
21	Meningkatnya Kenyamanan Kehidupan Bermasyarakat	21	Angka Kriminalitas Tertangani	Persen	73.8	72.00	97



Pengukuran capaian Indikator kinerja yang telah dicapai di atas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian data analisis capaian kinerja masing - masing sasaran dan indikator sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas SDM yang Inklusif dan Berdaya Saing

- a. Perbandingan antar target dan realisasi kinerja tahun ini.

Tabel 3.4
Target Capain Indikator Kinerja sasaran 1

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)
		Target	Realisasi	
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	71,37	71,54	100 %

Sumber data : Bappelitbangda Kab.Sidrap

Pengukuran capaian Indikator kinerja pada sasaran 1 yaitu meningkatkan kualitas SDM yang Inklusif dan Berdaya Saing menunjukkan realisasi capaian indeks pendidikan 71,54 dari target 71,73 dan rata-rata capaian kinerja yaitu sebesar 100% atau tercapai dengan kriteria **Sangat Tinggi**.

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capain kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.5
Perkembangan Pencapaian Sasaran Strategis 1

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi			Capaian (%)		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	71,05	71,21	71,54	100	100	100

Sumber data : Bappelitbangda Kab.Sidrap

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Indikator Kinerja pada sasaran Stretgis 1 Meningkatkan kualitas SDM yang Inklusif dan berdaya saing telah mencapai target. Capaian



Indikator pada sasaran ini dari beberapa tahun yang lalu masih tetap pada 100%

- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.6
Perbandingan Target Realisasi
sasaran 1 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun ini	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	71,54	72,18

Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini sebesar 71,54% sedangkan target untuk jangka menengah sebesar 72,18%, perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2021 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RJMD Kabupaten Sidenreng Rappang maka indikator tersebut belum mencapai target jangka menengah.

- d. Analisis Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

- Persentase Warga Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan
- Persentase warga usia 7-8 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan
- Persentase warga usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI)
- Persentase warga 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SMP/MTs)
- Persentase Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV
- Pemenuhan upaya kesehatan Perorangan dan masyarakat
- Persentase tenaga kesehatan terhadap fasilitasi kesehatan
- Cakupan rumah tangga yang berperilaku hidup sehat dan bersih.

- e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.7
Efisiensi Pengguna Sumber Daya Sasaran 1



Sasaran	Indikator	Capaian Kineja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatkan Kualitas SDM yang Inklusif dan Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia	100	95	5

Anggaran yang ditetapkan pada tahun 2021 untuk mendukung sasaran pencapaian sasaran ini terdiri dari 5 program sebesar Rp.107.649.877.667,- dengan realisasi sebesar Rp.162.732.467.096,- atau 95%. Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini sebesar 100%, berarti tingkat efisiensi sebesar 5 %

f. Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan.

1. Program Pengelolaan Pendidikan;
2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
3. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Peorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
4. Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;

Sasaran 2 : Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan

a. Perbandingan antar target dan realisasi kinerja tahun ini.

Tabel 3.8
Target Capain Indikator Kinerja sasaran 1

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)
		Target	Realisasi	
Indeks Pendidikan	%	62,54	62.44	99 %

Sumber data : Bappelitbangda Kab.Sidrap

Pengukuran capaian Indikator kinerja pada sasaran 2 yaitu meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan menunjukkan realisasi capaian indeks pendidikan 62.44 dari target 62,54 dan capaian kinerja yaitu sebesar 99 % atau tercapai dengan kriteria **Sangat Tinggi**.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capain kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.9
Perkembangan Pencapaian Sasaran Strategis 1



Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi			Capaian (%)		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
Indeks Pendidikan	Indeks	62.02	62.08	62.54	100	99	99

Sumber data : Bappelitbangda Kab.Sidrap

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Indikator Kinerja pada sasaran Stretgis 2 Meningkatnya akses pelayanan bidang pendidikan belum mencapai target. Capaian kinerja pada tahun 2020-2021 mengalami penurunan Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu dari 100 % turun menjadi 99%.

- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.10
Perbandingan Target Realisasi
sasaran 1 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun ini	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah
Indeks Pendidikan	Indeks	62.44	63.48

Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini sebesar 62.44 % sedangkan target untuk jangka menengah sebesar 63.48 %, perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2021 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RJMD Kabupaten Sidenreng Rappang maka indikator tersebut belum mencapai target jangka menengah.

- d. Analisis Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Keberhasilan/peningkatan pencapaian beberapa indikator pada sasaran Meningkatnya akses dan kualitas layanan pengelolaan Pendidikan disebabkan oleh



diantaranya pro aktifnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencari informasi dan mendistribuksikan kepada satuan pendidikan dan maksimalisasi perbaikan Data Pokok pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal untuk verifikasi anggaran DAK fisik maupun non fisik. Ditambah adanya program-program Prioritas Kepala Daerah untuk membantu seragam bagi siswa sehingga meningkatkan angka partisipasi Pendidikan di Kabupaten Sidrap. Adapun belum optimalnya kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam memaksimalkan pengelolaan Pendidikan di Kabupaten Sidrap karena adanya bencana PANDEMI COVID-19, sehingga mengganggu aktivitas pelayanan dan administrasi serta aktivitas belajar mengajar di sekolah.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.11
Efisiensi Pengguna Sumber Daya Sasaran 2

Sasaran A	Indikator	Capaian Kineja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatkan Akses dan Kualitas layanan Pendidikan	Indeks Pendidikan	99	98	1

Anggaran yang ditetapkan pada tahun 2021 untuk mendukung sasaran pencapaian sasaran ini terdiri dari 2 program sebesar Rp.98.865.744.787,- dengan realisasi sebesar Rp.96.939.613.184,- atau 98%. Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini sebesar 99%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 1 %

f. Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan.

1. Program Pengelolaan Pendidikan;
2. Program Pendidik dan Tenaga Kerja;



Sasaran 3 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

- a. Perbandingan antar target dan realisasi kinerja tahun ini.

Tabel 3.12
Target Capaian Indikator Kinerja sasaran 2

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)
		Target	Realisasi	
Indeks Kesehatan	Indeks	76.97	76.94	100

Sumber data : Bappelitbangda Kab.Sidrap

Pengukuran capaian Indikator kinerja pada sasaran 3 yaitu Derajat Kesehatan Masyarakat menunjukkan realisasi capaian indeks Kesehatan 76.94 dari target 76.97 dan rata-rata capaian kinerja yaitu sebesar 100% atau tercapai dengan kriteria **Sangat Tinggi**.

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.13
Perkembangan Pencapaian Sasaran Strategis 2

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi			Capaian (%)		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
Indeks Kesehatan	Indeks	56,80	56.86	76.94	100	100	100

Sumber data : Bappelitbangda Kab.Sidrap

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Indikator Kinerja pada sasaran Stretgis 3 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat telah mencapai target. Rata –rata capaian kinerja dari tahun 2019 sampai tahun 2021 telah mencapai 100 %

- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.



Tabel 3.14
Perbandingan Target Realisasi
sasaran 2 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun ini	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah
Indeks Kesehatan	%	76.94	77,58

Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini sebesar 76.94% sedangkan target untuk jangka menengah sebesar 77,58%, perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2021 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RJMD Kabupaten Sidenreng Rappang maka indikator tersebut belum mencapai target jangka menengah.

d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Permasalahan yang dihadapi :

1. Terbatasnya tenaga, baik segi kuantitatif maupun kualitatif jika dibandingkan dengan jumlah penduduk
2. Sarana dan Prasarana serta Alat Kesehatan di bidang Kesehatan belum mencapai ideal.
3. Kondisi alam berupa Cuaca dan geografis yang memicu terjadinya bencana (banjir) di sebagian wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dan banyaknya genangan air mempermudah perkembangbiakan nyamuk dan sumber penularan penyakit lainnya.

Solusi :

Terkait permasalahan yang dihadapi dan kondisi yang ada, maka diambil strategis dan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Pemanfaatan pelayanan kesehatan secara efektif dengan sarana dan prasarana yang tersedia.
2. Sosialisasi dan Pembinaan secara intensif ke Puskesmas.
3. Memperkuat kerjasama lintas sektor dan pihak ketiga yang dapat mendukung pembangunan kesehatan.
4. Pengefektifan sistem keuangan dan anggaran.
5. Prioritas upaya kesehatan pada kegiatan promotif dan preventif selain kuratif dan rehabilitatif.



e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.15
Efisiensi Pengguna Sumber Daya Sasaran 2

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	100	92	8

Anggaran yang ditetapkan pada tahun 2021 untuk mendukung sasaran pencapaian sasaran ini terdiri dari 3 program sebesar Rp.71.784.132.880,- dengan realisasi sebesar Rp.65.792.853.912,- atau 92%. Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini sebesar 100%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 8%

f. Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan.

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan ;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;

Sasaran 4 : Meningkatnya Keberdayaan Perempuan dalam Pembangunan

a. Perbandingan antar target dan realisasi kinerja tahun ini.

Tabel 3.16
Target Capain Indikator Kinerja sasaran 4

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)
		Target	Realisasi	
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	57,67	33.21	58

Sumber data : Bappelitbangda Kab.Sidrap

Pengukuran capaian Indikator kinerja pada sasaran 4 yaitu meningkatnya Keberdayaan perempuan dalam Pembangunan menunjukkan realisasi 33.21 dari target



57.67 dengan rata-rata capaian kinerja yaitu sebesar 58% atau tercapai dengan kriteria **Rendah**.

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.17
Perkembangan Pencapaian Sasaran Strategis 4

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi			Capaian (%)		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
1 Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	56.80	56.86	33.21	100	99	58

Sumber data : Bappelitbangda Kab.Sidrap

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Indikator Kinerja pada sasaran Stretgis 4 Meningkatnya Keberdayaan Perempuan dalam Pembangunan capaian kinerja dari tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir semakin menurun. Dengan realisasi tahun ini sebesar 33.21 dengan capaian sebesar 58%

- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.18
Perbandingan Target Realisasi sasaran 4
dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun ini	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah
Indeks Pemberdayaan Gender	%	33.21	59.01

Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini sebesar 33.21% sedangkan target untuk jangka menengah sebesar 59.01, perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2021 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RJMD Kabupaten Sidenreng Rappang maka indikator tersebut belum mencapai target jangka menengah.



d. Analisis Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja.

Kegagalan pencapaian beberapa indikator dapat disebabkan oleh beberapa hal diantaranya, jumlah anggota DPRD tidak bertambah selama 5 tahun, kurangnya sumber daya manusia, keterbatasan anggaran dikarenakan mengalami refocusing akibat dari pandemic Covid 19, pengembangan PUSPAGA harus bias sampai di desa. Namun demikian masih terdapat indikator kinerja yang telah memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan akan tetapi indikator kinerja yang belum terlihat hasil pencapaiannya itu disebabkan oleh penilaian dari indikator tersebut hasilnya akan dikeluarkan pada tahun berikutnya yakni pada sekitar bulan juni.

Kelemahan dari pencapaian indikator tersebut tentunya sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan dan upaya pencapaian target tahun berikutnya.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.19
Efisiensi Pengguna Sumber Daya Sasaran 4

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Keberdayaan Perempuan dalam Pembangunan	Indeks Perberdayaan Gender(IGD)	58	100	42

Anggaran yang ditetapkan pada tahun 2021 untuk mendukung sasaran pencapaian sasaran ini terdiri dari 2 program sebesar Rp.97.059.000,- dengan realisasi sebesar Rp.96,932,000,- atau 100%. Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini sebesar 58%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 42%.

f. Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan.

1. Program Pengarusutaman Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
2. Program Perlindungan Perempuan;



Sasaran 5 : Meningkatkan Pendapatan Masyarakat

- a. Perbandingan antar target dan realisasi kinerja tahun ini.

Tabel 3.20
Target Capain Indikator Kinerja sasaran 5

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)
		Target	Realisasi	
PDRB perkapita ADHB	Juta Rupiah	46,49	47.19	102

Sumber data : Bappelitbangda Kab.Sidrap

Pengukuran capaian Indikator kinerja pada sasaran Meningkatnya pendapatan masyarakat menunjukkan realisasi PDRB perkapita AHB 47.19 dari target 46,49 sehingga capain kinerja pada tahun 2021 sebesar 102% atau dengan kriteria **Sangat Tinggi**.

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.21
Perkembangan Pencapaian Sasaran Strategis 5

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi			Capaian (%)		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
PDRB Perkapita ADHB	Juta Rupiah	46,01	47.19	46.16	100	100	102

Sumber data : Bappelitbangda Kab.Sidrap

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi Indikator Kinerja pada sasaran Stretgis 5 Meningkatkan Pendapatan Masyarakat untuk tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 telah mencapai target, dengan Capaian Sebesar 100%.

- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.



Tabel 3.22
Perbandingan Target Realisasi
sasaran 5 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun ini	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah
PDRB Perkapita AHB	%	47.19	51,26

Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini sebesar 47.19% sedangkan target untuk jangka menengah sebesar 51.26, perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2021 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tersebut belum mencapai target jangka menengah.

d. Analisis Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

1. Capaian pada sektor pertanian :

- Adanya program pemerintah berupaya khusus melalui percepatan tanam yang anggarannya bersumber dari tugas pembantu serta pengadaan atau pembangunan sarana prasarana pertanian;
- Pembangunan Embun sebanyak 12 Unit;
- Pembangunan Irigasi Pompanisasi sebanyak 3 Unit;
- Pengawasan dan perencanaan pembangunan jalan tani sebanyak 4 paket;
- Pembangunan Dam dan Long Storage masing-masing unit.

2. Capaian pada sector Peternakan :

- Pencegahan dan penyakit menular ternak;
- Peningkatan produk hasil peternakan;
- Peningkatan Pemasaran hasil peternakan;
- Peningkatan penerapan pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan.

3. Capaian pada sector perikanan :

- Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan;
- Pengembangan budidaya perikanan;
- Pengembangan Perikanan tangkap;
- Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar.

4. Capaian pada sector UMKM :

- Guna Mendukung tumbuhnya UMKM pemerintah kabupaten Sidrap memberikan



kemudahan dalam perizinan.

- Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan guna peningkatan pengetahuan dan skill bagimasyarakat produktif untuk membuka lapangan kerja;

5. Capaian pada Sektor Tingkat Kemiskinan :

- Tercapainya penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Sosial dengan jumlah presentase warga yang diberdayakan dan menerima perlindungan sosial;

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.33

Efisiensi Pengguna Sumber Daya sasaran 5

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	PDRB Perkapita ADHB	102	94	8

Anggaran yang ditetapkan pada tahun 2021 untuk mendukung sasaran pencapaian sasaran ini terdiri dari 16 program sebesar Rp.31.239.746.100,- dengan realisasi sebesar Rp.29.297.085.520,- atau 94%. Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini sebesar 102%, berarti tingkat efisiensi sebesar 8%

f. Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

1. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
2. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
3. Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
4. Program pengelolaan perikanan budidaya
5. Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
6. Program penyuluhan pertanian
7. Program pengembangan UMKM
8. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan
9. Program Pemberdayaan Sosial
10. Program Rehabilitasi Sosial
11. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
12. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri
13. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
14. Program Penanganan Bencana
15. Program Hubungan Industri
16. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)



Sasaran 6 : Meningkatnya Produktivitas Sektor – Sektor Perekonomian Daerah

- a. Perbandingan antar target dan realisasi kinerja tahun ini.

Tabel 3.34
Target Capaian Indikator Kinerja sasaran 6

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)
		Target	Realisasi	
Pertumbuhan Ekonomi	%	3,38-4,51	5.54	123

Sumber data : Bappelitbangda Kab.Sidenreng Rappang

Indikator kinerja pada sasaran Meningkatnya Produktivitas Sektor-Sektor Perekonomian Daerah menunjukkan realisasi sebesar 5.54 dari target 3.38- 4.51 dan diperoleh capaian kinerja sebesar 123% atau dengan kriteria **Sangat Tinggi**

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.35
Perkembangan Pencapaian Sasaran Strategis 6

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi			Capaian (%)		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
Pertumbuhan Ekonomi	%	4,65	-0.59	5.54	100	100	123

Sumber data : Bappelitbangda Kab.Sidrap

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi Indikator Kinerja pada sasaran Stretgis 6 Meningkatnya Produktivitas Sektor-Sektor Perekonomian Daerah untuk tahun 2019 sampai tahun 2021 cenderung semakin meningkat, dimana menunjukkan capaian yang sangat tinggi.

- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.



Tabel 3.36
Perbandingan Target Realisasi sasaran 5
dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun ini	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah
Pertumbuhan Ekonomi	%	5.54	4,51-6,01

Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini sebesar 5.54% sedangkan target untuk jangka menengah sebesar 4.51-6.01%, perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 202 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tersebut telah mencapai target jangka menengah.

d. Analisis Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

- Ketersediaan Sarana Pertanian
- Layanan Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Ternak
- Pengelolaan Produksi Perikanan Budidaya
- Penanggulangan Bencana Pertanian
- Rasio Penyuluh Pertanian dan Peternakan
- Persentase Usaha Mikro dan Kecil Terhadap UMKM
- Persentase sarana dan prasarana distribusi perdagangan yang memadai

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.37
Efisiensi Pengguna Sumber Daya sasaran 6

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Produktivitas Sektor-Sektor Perekonomian Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	123	94	29

Anggaran yang ditetapkan pada tahun 2021 untuk mendukung sasaran pencapaian sasaran ini terdiri dari 8 program sebesar Rp.25,896,355,300,- dengan realisasi sebesar Rp.24,398,200,837,- atau 94 %. Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini sebesar 123%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 29%.



f. Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

1. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
2. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
3. Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
4. Program pengelolaan perikanan budidaya
5. Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
6. Program penyuluhan pertanian
7. Program pengembangan UMKM
8. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan

Sasaran 7: menurunnya Angka Kemiskinan

a. Perbandingan antar target dan realisasi kinerja tahun ini.

Tabel 3.38
Target Capain Indikator Kinerja sasaran 7

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)
		Target	Realisasi	
Tingkat kemiskinan	%	5,01	5,04	101

Sumber data : Bappelitbangda Kab.Sidrap

Pengukuran capaian Indikator kinerja pada sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan menunjukkan realisasi 5.04 dari target 5.01 dan mencapai target yaitu sebesar 100% di tahun 2021 dengan kriteria **Sangat Tinggi**.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.



Tabel 3.39
Perkembangan Pencapaian Sasaran Strategis 7

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi			Capaian (%)		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
Tingkat kemiskinan	%	4,78	5,05	5,04	100	100	101

Sumber data : Bappelitbangda Kab.Sidrap

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi Indikator Kinerja pada sasaran Stretgis 7 Menurunnya Angka Kemiskinan untuk tahun 2019 sampai tahun 2021 cenderung semakin meningkat, dimana menunjukkan capaian yang sangat tinggi.

- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.40
Perbandingan Target Realisasi
sasaran 7 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Sampai dengan Tahun ini	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah
Tingkat kemiskinan	%	5,04	4,78

Realisasi kinerja pada Indikator sampai dengan tahun ini sebesar Rp.5,04,- sedangkan target untuk jangka menengah sebesar Rp.4,78, perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2021 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tersebut telah mencapai target jangka menengah.

- d. Analisis Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Tercapainya sasaran "Mewujudkan Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Sosial" dapat diukur melalui indikator "Persentase Warga Negara yang Diberdayakan dan Menerima Perlindungan Sosial".

Beberapa kegiatan terlaksana dengan baik meskipun ada beberapa faktor yang



menjadi penghambat sehingga kinerja realisasi kurang maksimal. Faktor penghambatnya adalah adanya pemotongan anggaran dan pandemi covid-19 yang mengharuskan pembatasan ruang gerak (mobilitas) orang demi kepentingan melindungi kesehatan publik.

Untuk perbaikan dimasa mendatang, terutama dalam rangka memenuhi administrasi transparan dan akuntabel serta menciptakan dan menjaga kesinambungan yang berkelanjutan dari suatu program diharapkan anggaran dapat ditingkatkan demi kelancaran tercapainya rencana kinerja kegiatan serta peningkatan akomodir capaian kinerja dan koordinasi dengan stakeholder yang terkait. Dan didukung pandemi segera berakhir.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.41
Efisiensi Pengguna Sumber Daya sasaran 7

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Menurunnya Angka Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	101	89	12

Anggaran yang ditetapkan pada tahun 2021 untuk mendukung sasaran pencapaian sasaran ini Pada indikator Tingkat Kemiskinan terdiri dari 5 program sebesar Rp.4.034.244.000,- dengan realisasi sebesar Rp.3.591.893.483,- atau 89%. Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini sebesar 101%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 12%.

f. Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

- Program Pemberdayaan Sosial
- Program Rehabilitasi Sosial
- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
- Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.



Sasaran 8 : Menurunnya Ketimpangan Distribusi Pendapatan

- a. Perbandingan antar target dan realisasi kinerja tahun ini.

Tabel 3.42
Target Capain Indikator Kinerja sasaran 8

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)
		Target	Realisasi	
1 Gini Ratio	Poin	0.349	0.358	105

Sumber data : Bappelitbangda Kab.Sidrap

Pengukuran capaian Indikator kinerja pada sasaran Menurunnya Ketimpangan Distribusi pendapatan menunjukkan realisasi 0.349 dari target 0.358 dan mencapai target yaitu sebesar 105% di tahun 2021 dengan kriteria **Sangat Tinggi**.

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.43
Perkembangan Pencapaian Sasaran Strategis 8

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi			Capaian (%)		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
Gini Ratio	Poin	0.284	0.349	0.358	100	100	105

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi Indikator Kinerja pada sasaran Stretgis 8 Menurunnya Ketimpangan Distribusi Pendapatan untuk tahun 2019 sampai tahun 2021 cenderung semakin meningkat, dimana menunjukkan capaian yang sangat tinggi.

- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.44
Perbandingan Target Realisasi sasaran 8
dengan Target Jangka Menengah



Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Sampai dengan Tahun ini	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah
Gini Ratio	Poin	0.358	0.328

Realisasi kinerja pada Indikator sampai dengan tahun ini sebesar 0.358 sedangkan target untuk jangka menengah sebesar 0.328 perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2021 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tersebut telah mencapai target jangka menengah.

d. Analisis Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Gini Rasio digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan penduduk, angka koefisien gini berkisar antara 0-1, semakin mendekati 0 nilai gini, semakin tidak timpang pendapatan masyarakat dalam suatu wilayah.

Untuk Kabupaten Sidenreng Rappang, nilai Koefisien gini sejak tahun 2017 hingga 2020 semakin kecil, yang berarti ketimpangan pendapatan masyarakat semakin rendah. Sedangkan ditahun 2021 rasio gini Kabupaten Sidenreng Rappang naik yaitu sebesar 0.358%. salah satu factor yang menyebabkan ketimpangan pendapatan naik dikarena akibat Pandemi Covid -19. Kesenjangan antara penduduk antara yang kaya dan miskin semakin melebar.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.45
Efisiensi Pengguna Sumber Daya sasaran 8

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Menurunnya Ketimpangan Distribusi Pendapatan	Gini Rato	105	100	5

Anggaran yang ditetapkan pada tahun 2021 untuk mendukung sasaran pencapaian sasaran ini dari 3 program sebesar Rp.1.309.146.800,- dengan realisasi sebesar Rp.1.306.991.200,- atau 100%. Dibanding dengan capaian kinerja sebesar 105% , berarti Efisiensi dalam Penggunaan Sumber Daya sebesar 5%.



- f. Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan
- Program Penanganan Bencana
 - Program Hubungan Industri
 - Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

Sasaran 9 : Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja

- a. Perbandingan antar target dan realisasi kinerja tahun ini.

Tabel 3.46
Target Capain Indikator Kinerja sasaran 9

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)
		Target	Realisasi	
1 Tingkat pengangguran Terbuka	%	5.88	4.93	84

Sumber data : Bappelitbangda Kab.Sidrap

Indikator kinerja pada sasaran Meningkatnya Penerapan Tenaga Kerja menunjukkan realisasi sebesar 4.93 dari target 5.88 dengan capaian Kinerja sebesar 84% atau tercapai dengan kriteria **Tinggi**.

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.47
Perkembangan Pencapaian Sasaran Strategis 9

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi			Capaian (%)		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
1 Tingkat Pengangguran Terbuka	Poin	4.75	5.91	4.93	80	80	84

Sumber data : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi Indikator Kinerja pada sasaran Stretgis 9 Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja untuk tahun 2019 sampai tahun 2020, dimana menunjukkan capaian yang masing-masing sebesar 80%. Sedangkan untuk Tahun



2021 mengalami kenaikan sebesar 84 %.

- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.48
Perbandingan Target Realisasi
sasaran 9 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun ini	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4.93	5.65

Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini sebesar 4.93% sedangkan target untuk jangka menengah sebesar 5.65%, perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2021 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tersebut belum mencapai target jangka menengah.

- d. Analisis Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Tercapainya indikator pada sasaran ini disebabkan karena membaiknya kondisi perekonomian yang sempat terpukul akibat pandemi covid 19 sehingga menggairahkan dunia usaha dan membuka lapangan kerja baru serta Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi dan Pengadaan sarana Pelatihan Kerja

- e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.49
Efisiensi Pengguna Sumber Daya sasaran 9

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	84	100	16

Anggaran yang ditetapkan pada tahun 2021 untuk mendukung sasaran pencapaian sasaran ini terdiri dari 1 program sebesar Rp.1.100.473.00,- dengan realisasi sebesar



Rp.1.100.443.000,- atau 100%. Dibandingkan dengan capaian kinerja pada sasaran ini sebesar 84%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 16%.

f. Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

- Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas

Sasaran 10 : Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan Daya Saing Daerah

a. Perbandingan antar target dan realisasi kinerja tahun ini.

Tabel 3.50
Target Capain Indikator Kinerja sasaran 10

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021(%)
		Target	Realisasi	
Nilai Investasi	Rupiah (Triliun)	3.615,32	323.553.964.518,-	9,28

Sumber data : Bappelitbangda Kab.Sidrap

Pengukuran capaian Indikator kinerja pada sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan Daya Saing Daerah menunjukkan realisasi Nilai Investasi sebesar Rp/Triliun 3.615.320.000.000,- dari target Rp 335.572.253.290,- dengan capaian kinerja yaitu sebesar 9 dengan kriteria **Sangat Rendah**.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.51
Perkembangan Pencapaian Sasaran Strategis 10

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi			Capaian (%)		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
Nilai Investasi	Rp Triliun	205.118.000.000,-	205.118.999.753,-	325.553.964.518,-	193	130	9.28

Sumber data : Bappelitbangda Kab.Sidrap

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi Indikator Kinerja pada sasaran



Strategis 10 Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan Daya Saing Daerah untuk tahun 2019 sampai tahun 2020, dimana menunjukkan capaian sangat tinggi, Sedangkan untuk Tahun 2021 mengalami penurunan di karenakan adanya perubahan target indikator pada tahun ini.

- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.52
Perbandingan Target Realisasi
sasaran 10 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Sampai dengan Tahun ini	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah
Nilai Investasi	Rp Triliun	323.553.964.518,-	3.946.040.000.000,-

Perbandingan realisasi indikator kinerja Nilai Investasi terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang belum mencapai target jangka menengah.

- d. Analisis Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Tabel 3.53
Klasifikasi Sektor Investasi PMDN

No.	Sektor Usaha	Jumlah Perusahaan	Nilai Investasi (Rp)
1.	Pertanian, Perikanan, Kehutanan	22	62.694491.000
2.	Industry Pengolahan	106	49.004.000.000
3.	Perdagangan	95	101.526.500.000
4.	Penyedia Akomodasi dan Makan Minum	71	16.802.500.000
5.	Real Estate	10	13.010.000.000
6.	Konstruksi	16	36.135.473.518
7.	Informasi dan Komunikasi	36	15.765.000.000
8.	Pendidikan, Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	24	10.210.000.000
9.	Aktivitas Kesehatan, Sosial, Penyewa, Ilmiah, dan Teknis	33	13.132.000.000
10.	Aktivitas Jasa Lainnya	30	5.274.000.000
Jumlah			323.553.964.518



- Pengembangan strategi dan instrument promosi yang mencitrakan dan memperkuat *brand image* Sidenreng Rappang sebagai daerah dengan iklim investasi bidang agribisnis yang kondusif sesuai dengan visi penanaman modal.
- Secara geografis, demografis, dan topografis Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki potensi ekonomi yang cukup tinggi dan beraneka ragam yang apabila dikelola secara terpadu dan komprehensif, dapat memberikan nilai tambah ekonomi yang sangat tinggi baik bagi kesejahteraan masyarakat maupun bagi penerimaan keuangan daerah.
- Sektor ekonomi yang menjadi basis untuk dikembangkan adalah sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Dengan demikian, maka pengembangan kegiatan penanaman modal perlu diupayakan ke arah pengembangan agribisnis. Untuk itu perlu didukung dengan penyediaan sarana prasarana dan infrastruktur pendukung agar terjamin kelancaran pasokan bahan baku dan akses pasar yang lebih efisien, baik pada skala domestic maupun internasional.
- Ketersediaan lahan dengan tingkat produktivitas yang relative sudah baik, meskipun belum optimal sesuai ketersediaan potensi memerlukan perhatian dari pemerintah daerah untuk meningkatkannya melalui berbagai program lintas sektoral dan terpadu menuju penatausahaan agribisnis yang modern.
- Tingginya nilai tambah ekonomi bagi pengembangan usaha industry pengolahan yang relative masih sangat sedikit ragamnya memerlukan usaha-usaha diversifikasi industry, terutama industry pengolahan yang menggunakan hasil-hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan sebagai bahan baku utama.
- Untuk mendorong kegiatan penanaman modal, diperlukan usahausaha promotif, pendampingan dan fasilitas, serta proses perizinan yang lebih ramah, murah, dan terjangkau serta pelayanan yang cepat dari seluruh unsur pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Kepastian hukum sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan penanaman modal, untuk itu diperlukan usaha untuk mensinkronisasi regulasi daerah dengan regulasi nasional.
- Kemudahan dan insentif penanaman modal perlu terus ditingkatkan untuk mendorong peningkatan kegiatan penanaman modal, bukan hanya untuk investasi asing, tapi juga untuk investasi domestic, khususnya bagi UMKMK.



e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.54
Efisiensi Pengguna Sumber Daya sasaran 10

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan Daya Saing Daerah	Nilai Investasi	214	92	122

Anggaran yang ditetapkan pada tahun 2021 untuk mendukung sasaran pencapaian sasaran ini pada indikator Nilai Investasi terdiri dari 3 program sebesar Rp.5.223.147.403,- dengan realisasi sebesar Rp.4.818.418.313,- atau 92%. Dibandingkan dengan capaian kinerja pada Indikator ini sebesar 214%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung indikator ini adalah sebesar 122%.

f. Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

- Program Promosi Penanaman Modal
- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- Program Pemasaran Pariwisata

Sasaran 11 : Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan

a. Perbandingan antar target dan realisasi kinerja tahun ini.

Tabel 3.55
Target Capain Indikator Kinerja sasaran 11

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)
		Target	Realisasi	
Pertumbuhan PDRB Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Transportasi dan Pergudangan, Serta Konstruksi (ADHK)	%	2.00-3.91	6.29	161

Sumber data : Bappelitbangda Kab.Sidrap



Indikator kinerja pada sasaran Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan menunjukkan realisasi sebesar 6.29 dari target 2.00-3.91 dan telah capaian target yaitu sebesar 161% atau tercapai dengan criteria **Sangat Tinggi**.

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.56
Perkembangan Pencapaian Sasaran Strategis 11

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi			Capaian (%)		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
1 Pertumbuhan PDRB Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Transportasi dan Pergudangan, Serta Konstruksi (ADHK)	%	9.21	1.67	6.29	100	100	161

Sumber data : Bappelitbangda Kab.Sidrap

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi Indikator Kinerja pada sasaran Stretgis 11 Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan untuk tahun 2019 sampai tahun 2020, dimana menunjukkan capaian yang masing-masing sebesar 100%. Sedangkan untuk Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 161 %.

- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.57
Perbandingan Target Realisasi
sasaran 11 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Sampai dengan	Kondisi Kinerja Target
Pertumbuhan PDRB Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Transportasi dan Pergudangan, Serta Konstruksi (ADHK)	%	6.29	7.71

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini sebesar 6.29 sedangkan



target untuk jangka menengah sebesar 7.71, perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2021 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tersebut belum mencapai target.

d. Analisis Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

- Persentase Irigasi dalam kondisi baik;
- Persentase Drainase Dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat;
- Persentase bangunan ber-IMB Persatuan Bangunan;
- Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap;
- Ketersediaan Rumah layak huni;
- Persentase penduduk berakses air minum yang layak;
- Persentase warga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah Domestik;
- Persentase Pencemaran Lingkungan Hidup;
- Persentase Luasan RTH publik dari luas wilayah Kota/Perkotaan;
- Persentase Pengelolaan sampah di wilayah Kabupten.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.58
Efisiensi Pengguna Sumber Daya sasaran 11

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan	Pertumbuhan PDRB Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Transportasi dan Pergudangan, Serta Konstruksi (ADHK)	161	97	64

Anggaran yang ditetapkan pada tahun 2021 untuk mendukung sasaran pencapaian sasaran ini terdiri dari 3 program sebesar Rp.93.370.411.00,- dengan realisasi sebesar Rp.95.442.822.811,- atau 97%. Dibandingkan dengan capaian kinerja pada sasaran ini sebesar 161%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 64%.



- f. Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan
1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
 2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
 3. Program Penataan Bangunan Gedung;
 4. Program Penyelenggaraan Jalan;
 5. Program Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
 6. Program Pengolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
 7. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
 8. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 9. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI);
 10. Program Pengelolaan Persampahan.

Sasaran 12 : Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas

- a. Perbandingan antar target dan realisasi kinerja tahun ini.

Tabel 3.59
Target Capain Indikator Kinerja sasaran 12

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)
		Target	Realisasi	
Indeks Layananan Infrastruktur	Indeks	71.89	76.23	106

Sumber data : Bappelitbangda Kab.Sidrap

Dari Indikator kinerja Indeks Layanan Infrastruktur yang mendukung sasaran 12 Meningkatnya keKetersediaan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas telah mencapai target sebesar 106% dengan kriteria **Sangat Tinggi**.

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.



Tabel 3.60
Perkembangan Pencapaian Sasaran Strategis 12

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi			Capaian (%)		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
Indeks Layanan Infrastruktur	Indeks	66.75	67.76	76.23	100	100	106

Sumber data : Bappelitbangda Kab.Sidrap

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi Indikator Kinerja pada sasaran Stretgis 12 Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas untuk tahun 2019 sampai tahun 2020, dimana menunjukkan capaian yang masing-masing sebesar 80%. Sedangkan untuk Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 106%.

- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.61
Perbandingan Target Realisasi
sasaran 12 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Sampai dengan Tahun ini	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah
Indeks Layanan Infrastruktur	Indeks	76.23	77.22

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini sebesar 76.23 sedangkan target untuk jangka menengah sebesar 77.22, perbandingan realisasi indicator kinerja sampai dengan tahun 2021 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tersebut belum mencapai target.

- d. Analisis Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

- **Tingkat kemantapan jalan**

Pembangunan infrastruktur bidang jalan yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat sudah sesuai dengan dengan perencanaan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas.

- **Persentase Penduduk Berakses Air Minum layak**

Pembangunan infrastruktur air minum yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga,



Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat sudah sesuai dengan dengan perencanaan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas.

- **Tingkat kepatuhan tata ruang**

Tingkat kepatuhan masyarakat dalam membangun sudah sesuai dengan dengan perencanaan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas.

- **Persentase ketersediaan rumah layak huni**

Pelaksanaan program yang melaksanakan ketersediaan rumah layak huni sudah sesuai dengan Rencana Strategis Dinas.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.62
Efisiensi Pengguna Sumber Daya sasaran 12

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas	Indeks Layanan Infrastruktur	106	99	7

Anggaran yang ditetapkan pada tahun 2021 untuk mendukung sasaran pencapaian sasaran ini pada indikator Indeks Layanan Infrastruktur terdiri dari 4 program sebesar Rp.78.186.437.000,- dengan realisasi sebesar Rp.77.546.126.195,- atau 99%. Dibandingkan dengan capaian kinerja pada indikator ini sebesar 106%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung indikator ini adalah sebesar 7%.

f. Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

1. Program Penyelenggaraan Jalan;
2. Program Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kumuh;
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan sistem penyediaan air minum;
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.



Sasaran 13 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

a. Perbandingan antar target dan realisasi kinerja tahun ini.

Tabel 3.63
Target Capaian Indikator Kinerja sasaran 13

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)
		Target	Realisasi	
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	66.26	65.01	98

Sumber data : Bappelitbangda Kab.Sidrap

Dari Indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang mendukung sasaran 13 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 98% dengan kriteria **Sangat Tinggi**.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.64
Perkembangan Pencapaian Sasaran Strategis 13

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi			Capaian (%)		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	66.53	65.54	65.01	100	100	98

Perbandingan realisasi kinerja untuk indikator ini dengan beberapa tahun terakhir mengalami penurunan sebesar 65.02 dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan capaian kinerja pada tahun 2021 untuk sasaran ini sebesar 98%.

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengantahun ini dengan target jangka menengah yangterdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.65
Perbandingan Target Realisasi sasaran 13
dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Sampai dengan Tahun ini	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah



Indeks Kualitas Lingkungan (IKLH)	Indeks	65.01	67.48
-----------------------------------	--------	-------	-------

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini sebesar 65.01 sedangkan target untuk jangka menengah sebesar 67.48, perbandingan realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2021 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tersebut belum mencapai target.

d. Analisis Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Penurunan Kinerja yang terjadi dari tahun 2020 ke tahun 2021 dipengaruhi berbagai hal, diantaranya adalah :

1. Alih fungsi lahan menjadi usaha penambangan dan tidak adanya reklamasi lahan pasca galian tambang, sehingga meningkatkan potensi banjir, penurunan kualitas air akibat pestisida dari lahan pertanian.
2. Penanganan sampah dan drainase / got limbah rumah tangga belum dikelola dengan baik.
3. Penegakan hukum lemah, serta rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang Perda Lingkungan Hidup dan resiko bencana akibat penurunan kualitas lingkungan.
4. Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) dalam melakukan pengawasan dan melakukan kajian yang mendalam terhadap permasalahan-permasalahan.

Adapun rencana tindak lanjut yang dilakukan dalam peningkatan kinerja capaian sasaran adalah sebagai berikut :

1. Menegakkan integritas dan komitmen Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dan seluruh stakeholder dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup, terutama dalam implementasi produk hukum dan kebijakan yang telah ditetapkan
2. Peningkatan kapaasitas perangkat daerah di Bidang lingkungan hidup, salah satu yang dapat dilakukan adalah melaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk perangkat daerah tentang teknologi pengelolaan lingkungan dan peningkatan peran serta masyarakat
3. Melakukan kajian ilmiah terhadap status lingkungan hidup di Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai dasar atau rujukan dalam pengambilan keputusan



4. Mendorong ketertiban aktif masyarakat dan pelaku peduli dalam konservasi, preservasi dan rehabilitasi pada basis wilayah baik di kawasan hulu / pegunungan dan lahan kritis, kawasan dataran rendah.

- e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.66
Efisiensi Pengguna Sumber Daya sasaran 13

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	98	89	9

Anggaran yang ditetapkan pada tahun 2021 untuk mendukung sasaran pencapaian sasaran ini pada indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) terdiri dari 3 program sebesar Rp.10.091.987.000,- dengan realisasi sebesar Rp.8.948.348.308,- atau 89%. Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini sebesar 98%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung indikator ini adalah sebesar 9%.

- f. Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan
 1. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 2. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI);
 3. Program Pengelolaan Persampahan.

Sasaran 14 : Meningkatkan Kualitas Tatakelola Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- a. Perbandingan antar target dan realisasi kinerja tahun ini.

Tabel 3.67
Target Capain Indikator Kinerja sasaran 14

Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian 2021 (%)
Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	53.08	47.12	89

Sumber data : Bappelitbangda Kab.Sidrap

Dari realisasi Indikator kinerja yang mendukung sasaran 14 Meningkatnya Kualitas



Tatakelola Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik menunjukkan realisasi sebesar 47.12 dari target 47.12 dan Capaian Kinerja sebesar 89% atau tercapai dengan kriteria **Tinggi**.

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.68
Perkembangan Pencapaian Sasaran Strategis 14

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi			Capaian (%)		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	30.02	47.12	47.12	-	89	89

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi Indikator Kinerja pada sasaran Stretgis 14 Indeks Reformasi Birokrasi untuk tahun 2019 indeks sebesar 30.02, belum ada penentuan indikator sehingga belum menunjukkan capaian, sedangkan pada tahun 2020 – 2021 dengan realisasi 47.12 yang menunjukkan menunjukkan capaian sebesar 89%.

- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.69
Perbandingan Target Realisasi
sasaran 14 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Sampai dengan Tahun ini	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah
Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	47.12	71.11

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini sebesar 47.12 sedangkan target untuk jangka menengah sebesar 71.11, perbandingan realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2021 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tersebut belum mencapai target.

- d. Analisis Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja
- Belum optimalnya Implementasi Birokrasi pemerintah yang profesional, berintegrasi, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik,



netral sejahterah, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai etika dan kode etik.

- Masih rendahnya komitmen dari pimpinan instansi dan perannya dalam usaha melakukan reformasi birokrasi.
- Dengan berpedoman beberapa aspek area perubahan sebagai langkah utama kedepannya pelaksanaan Reformasi Birokrasi yaitu :
 - Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)
 - Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, afektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance
 - Regulasi yang tidak tumpang tindih dan harmonisasi serta mendorong pencapaian kinerja pemerintahan
 - SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera
 - Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi
 - Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat dan dunia usaha
 - Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.70
Efisiensi Pengguna Sumber Daya sasaran 14

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatkan Kualitas Tatakelola Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	89	85	4

Anggaran yang ditetapkan pada tahun 2021 untuk mendukung sasaran pencapaian sasaran ini terdiri dari 7 program sebesar Rp.5.019.242.400,- dengan realisasi sebesar Rp.4.270.083.405,- atau 85%. Dibandingkan dengan capaian kinerja pada sasaran ini sebesar 89%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung indikator ini adalah sebesar 4%.

f. Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan.



1. Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
2. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah;
3. Program Penyelenggaran Pengawasan;
4. Program Pelayanan Penanaman Modal;
5. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
6. Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelyanan Publik
7. Program Aplikasi Informatika

Sasaran 15 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

- a. Perbandingan antar target dan realisasi kinerja tahun ini.

Tabel 3.71
Target Capain Indikator Kinerja sasaran 15

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)
		Target	Realisasi	
Nilai SAKIP	Poin	65.19	60.03	92

Sumber data : Bagian Organisasi Setda Kab.Sidrap

Target Indikator sasaran Nilap SAKIP dengan poin 65.19. sedangkan untuk realisasi 60.03 (Tahun 2020) dan capaian indikator tersebut sebesar 92 %. (kami pakai angka realisasi tahun 2020 karna untuk penilaian Tahun 2021 yang mana hasilnya belum dirilis oleh Kemenpan RB).

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.72
Perkembangan Pencapaian Sasaran Strategis 15

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi			Capaian (%)		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
Nilai SAKIP	Poin	55,33	60.03	60.03	97	105	92



Sumber data : Bagian Organisasi Setda Kab.Sidrap

Perbandingan realisasi kinerja untuk indikator ini dengan beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar 60.03 dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan capaian kinerja pada tahun 2021 untuk sasaran ini sebesar 92%.

- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.73
Perbandingan Target Realisasi
sasaran 15 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Sampai dengan Tahun ini	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah
Nilai SAKIP	Poin	60.03	78.78

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini sebesar 60.03 sedangkan target untuk jangka menengah sebesar 78.78, perbandingan realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2021 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tersebut belum mencapai target.

- d. Analisis Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Capaian kinerja sasaran pada tahun 2020 mencapai nilai 60.03 dengan predikat B, mengalami kenaikan nilai jika dibandingkan capaian kinerja sasaran pada tahun 2019 dan 2018 mencapai nilai 55,33 dengan predikat CC dan dikategorikan cukup baik.

Dalam peningkatan SAKIP secara umum para instansi pemerintah belum secara intensif melakukan penerapan SAKIP. Dari kendala yang ada dan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu adanya kerjasama Tim. Serta mengupayakan memafaatkan e-sakip yang mana diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pengolahan data, kualitas data serta mempercepat pelaporan.

- e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya



Tabel 3.74
Efisiensi Pengguna Sumber Daya sasaran 15

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintah Daerah	Nilai sakisip	92	95	3

Anggaran yang ditetapkan pada tahun 2021 untuk mendukung pencapaian sasaran ini pada indikator ini terdiri dari 3 program sebesar Rp.2,445,878,000., dengan realisasi sebesar Rp.2.330,869,005 atau 95%. Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini sebesar 92%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung indikator ini adalah sebesar 3%.

- f. Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan
1. Program Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 2. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
 3. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Sasaran 16 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

- a. Perbandingan antar target dan realisasi kinerja tahun ini.

Tabel 3.75
Target Capain Indikator Kinerja sasaran 16

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)
		Target	Realisasi	
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	80,14 (B)	78,31 (B)	98

Sumber data : Bappelitbagngda Kab.Sidrap

Pengukuran capaian Indikator kinerja pada sasaran ini menunjukkan realisasi sebesar 78.31 dari target 80.14 dengan capaian kinerja yaitu sebesar 98% atau dengan kriteria *Sangat Tinggi*.

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun



lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.76
Perkembangan Pencapaian Sasaran Strategis 16

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi			Capaian (%)		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	74,58	76.96	78.31	100	100	98

Sumber data : Bappelitbangda Kab.Sidrap

Perbandingan Capaian kinerja untuk indikator ini dengan beberapa tahun terakhir mengalami penurunan sebesar 98% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan Untuk Realisasi kinerja mengalami Peningkatan pada tahun 2021 dengan Indeks 78.31.

- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.77
Perbandingan Target Realisasi
sasaran 16 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Sampai dengan Tahun ini	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah
Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	78,31	88,35

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini sebesar 78.31 sedangkan target untuk jangka menengah sebesar 88.35, perbandingan realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2021 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tersebut belum mencapai target.

- d. Analisis Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

- *Kurangnya Sumber Daya Manusia*

Sebagai pelayan masyarakat jumlah ASN sebagai pengelola, administrasi dan penentu kebijakan lebih sedikit dibanding dengan jumlah layanan kebutuhan



yang ada. Untuk mengantisipasi kekurangan ini maka dimanfaatkan tenaga sosial dalam proses pelayanan dan administrasi.

- *Sarana dan prasarana pelayanan yang kurang mendukung*

Untuk mendapatkan layanan yang memuaskan bagi masyarakat dan meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik yang dilakukan, maka diperlukan unsur-unsur yang dapat mendukung peningkatan kualitas layanan. Salah satu unsur dimaksud adalah pemenuhan sarana dan prasarana dasar pelayanan

- *Meningkatkan kualitas layanan yang lebih efektif dan efisien*

Dengan menggunakan sumberdaya yang ada, sehingga pada akhirnya akan memberikan layanan yang cukup memuaskan masyarakat serta pihak-pihak lain yang berkepentingan.

- *Meningkatkan profesionalisme petugas pelayanan,*

sehingga akan tercipta suasana kerja yang lebih produktif dan berkualitas.

- *Secara bertahap akan melakukan pengadaan sarana dan prasarana pendukung layanan,* untuk memudahkan dan memperpendek alur layanan, serta memberi efisiensi dan efektifitas pelayanan.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.78
Efisiensi Pengguna Sumber Daya sasaran 16

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	98	57	41

Anggaran yang ditetapkan pada tahun 2021 untuk mendukung pencapaian sasaran ini pada indikator pertama terdiri dari 3 program sebesar Rp.423.329.400-, dengan realisasi sebesar Rp.240.055.500,- atau 57%. Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini sebesar 98%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung indikator ini adalah sebesar 41%.

f. Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan



1. Program Pelayanan Penanaman Modal
2. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Sasaran 17 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik

- a. Perbandingan antar target dan realisasi kinerja tahun ini.

Tabel 3.79
Target Capain Indikator Kinerja sasaran 17

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)
		Target	Realisasi	
1 Indeks Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	2,20	1,78	81

Sumber data : Bappelitbangda Kab.Sidrap

Pengukuran capaian Indikator kinerja pada sasaran ini menunjukkan realisasi sebesar 1.78 dari target 2.20 dengan capaian kinerja yaitu sebesar 81% atau dengan kriteria **Tinggi**.

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.80
Perkembangan Pencapaian Sasaran Strategis 17

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi			Capaian (%)		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
1 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	1,91	2.13	1,78	-	-	81

Sumber data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang



Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sasaran Stretgis 17 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) pada Indikator ini di Tahun 2020 belum ada penetapan indikator pada tahun sebelumnya sehingga belum ada realisasi dan capaian indikator. Sedangkan untuk tahun 2021 realisasi indikator sebesar 1.78 dengan capaian sebesar 81%.

- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.81
Perbandingan Target Realisasi
sasaran 17 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Sampai dengan Tahun ini	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	1,78	2,60

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini sebesar 1.78 sedangkan target untuk jangka menengah sebesar 2.60 perbandingan realisasi indicator kinerja sampai dengan tahun 2021 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tersebut belum mencapai target.

- d. Analisis Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Keberhasilan/peningkatan pencapaian beberapa indikator pada sasaran ini didukung dengan adanya program Aplikasi Informatika

Tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang melaksanakan beberapa sub kegiatan sesuai anggaran yang tersedia, sebagai berikut:

1. Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
2. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
3. Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
4. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
5. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik.



e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.82
Efisiensi Pengguna Sumber Daya sasaran 17

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	81	79	2

Anggaran yang ditetapkan pada tahun 2021 untuk mendukung pencapaian sasaran ini pada indikator pertama terdiri dari 1 program sebesar Rp.2.150.035.000, dengan realisasi sebesar Rp.1.699.158.900,- atau 79%. Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini sebesar 81%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung indikator ini adalah sebesar 2%.

f. Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

1. Program Aplikasi Informatika

Sasaran 18 : Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

a. Perbandingan antar target dan realisasi kinerja tahun ini.

Tabel 3.83
Target Capain Indikator Kinerja sasaran 18

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)
		Target	Realisasi	
Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0,7278	0,7278	100

Sumber data : Bappelitbangda Kab.Sidrap

Pengukuran capaian Indikator kinerja pada sasaran ini menunjukkan realisasi sebesar 0.7278 dari target 0.7278 dengan capaian kinerja yaitu sebesar 100% atau dengan kriteria **Sangat Tinggi**.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.84
Perkembangan Pencapaian Sasaran Strategis 18



Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi			Capaian (%)		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0,6479	0,6583	0,7278	100	100	100

Sumber data : Bappelitbangda Kab.Sidrap

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sasaran Stretgis 18 Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Indikator ini di Tahun 2019-2021 telah mencapai 100%.

- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.85
Perbandingan Target Realisasi
sasaran 18 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Sampai dengan Tahun ini	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah
Indeks Desa Membangun	Indeks	0,7278	0,7854

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini sebesar 0.7278 sedangkan target untuk jangka menengah sebesar 0.7854 perbandingan realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2021 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tersebut belum mencapai target.

- d. Analisis Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja
- Persentase Peningkatan Perkembangan Desa
 - Persentase Pengentasan Desa Tertinggal
 - Persentase Desa/Kelurahan Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang Aktif
 - Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.86
Efisiensi Pengguna Sumber Daya sasaran 18



Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Indeks Desa Membangun	100	90	10

Anggaran yang ditetapkan pada tahun 2021 untuk mendukung pencapaian sasaran ini pada indikator ini terdiri dari 2 program sebesar Rp.15.243.629.400,- dengan realisasi sebesar Rp.13.648.899.980,- atau 90%. Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini sebesar 100%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung indikator ini adalah sebesar 10%.

f. Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

1. Program Penataan Desa
2. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan ,Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Sasaran 19 : Terwujudnya Desa Maju dan Mandiri

a. Perbandingan antar target dan realisasi kinerja tahun ini.

Tabel 3.87
Target Capain Indikator Kinerja sasaran 19

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)
		Target	Realisasi	
1 Persentase Desa Maju dan Mandiri	Indeks	67,47	70,59	105

Sumber data : Bappelitbangda Kab.Sidrap

Pengukuran capaian Indikator kinerja pada sasaran ini menunjukkan realisasi sebesar 70,59 dari target 64,47 dengan capaian kinerja yaitu sebesar 105% atau dengan kriteria *Sangat Tinggi*.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.



Tabel 3.88
Perkembangan Pencapaian Sasaran Strategis 19

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi			Capaian (%)		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
Terwujudnya Desa Maju dan Mandiri	%	8,82	22,05	70,59	100	100	105

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sasaran Stretgis 19 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah pada Indikator ini di Tahun 2019 dan 2020 belum ada penetapan indikator sehingga belum ada realisasi dan capaian indikator. Sedangkan untuk tahun 2021 realisasi indikator sebesar 70.59% dengan capaian sebesar 105%.

- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.89
Perbandingan Target Realisasi
sasaran 19 presentase desa maju dan mandiri

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Sampai dengan Tahun ini	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah
Persentase Desa Maju dan Mandiri	%	70,59	85,29

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini sebesar 70.59 sedangkan target untuk jangka menengah sebesar 85.29 perbandingan realisasi indicator kinerja sampai dengan tahun 2021 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tersebut belum mencapai target.

- d. Analisis Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

- Persentase Peningkatan Perkembangan Desa
- Persentase Pengentasan Desa Tertinggal
- Persentase Desa/Kelurahan Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang Aktif
- Persentase Peningkatan Perkembangan Desa
- Persentase Desa Tertinggal



e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.90
Efisiensi Pengguna Sumber Daya sasaran 19

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Terwujudnya Desa Maju dan Mandiri	Presentase Desa Maju dan Mandiri	105	90	15

Anggaran yang ditetapkan pada tahun 2021 untuk mendukung pencapaian sasaran ini pada indikator pertama terdiri dari 2 program sebesar Rp.15.243.629.400, dengan realisasi sebesar Rp.13.648.899.980,- atau 90%. Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini sebesar 105%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung indikator ini adalah sebesar 15%.

f. Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

1. Program Administrasi Pemerintahan Desa
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sasaran 20 : Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban serta Kualitas Kehidupan Sosial masyarakat yang Religius dan Berbudaya

a. Perbandingan antar target dan realisasi kinerja tahun ini.

Tabel 3.91
Target Capain Indikator Kinerja sasaran 20

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)
		Target	Realisasi	
1 Angka Kriminalitas	Kasus	355	400	84

Sumber data : Bappelitbangda Kab.Sidrap

Pengukuran capaian Indikator kinerja pada sasaran ini menunjukkan realisasi sebesar 400 dari target 355 dengan capaian kinerja yaitu sebesar 84% atau dengan kriteria



Tinggi.

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.92
Perkembangan Pencapaian Sasaran Strategis 2021

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi			Capaian (%)		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
1 Angka Kriminalitas	Kasus	474	367	400	80	80	84

Sumber data : Bappelitbangda Kab.Sidrap

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sasaran Stretgis 20 Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban serta Kualitas pada Indikator ini di Tahun 2019 telah mencapai 80 %. Sedangkan untuk tahun 2021 realisasi indikator sebesar 400 kasaus dengan capaian sebesar 84%.

- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.93
Perbandingan Target Realisasi
sasaran 20 Angka Kriminalitas

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Sampai dengan Tahun ini	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah
Angka kriminalitas	Kasus	400	339

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini sebesar 400 kasus sedangkan target untuk jangka menengah sebesar 339 kasus perbandingan realisasi indicator kinerja sampai dengan tahun 2021 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tersebut belum mencapai target.

- d. Analisis Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja faktor penyebab peningkatan sebagai berikut ;



1. Koordinasi yang berjalan optimal/maksimal di antara pemangku kepentingan dalam menengani dan menyelesaikan setiap permasalahan di lapangan.
2. Sarana pendukung kegiatan yang memadai
3. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap arti pentingnya ketertiban, ketentraman dan keindahan.
4. Ketersediaan anggaran dalam anggaran pelaksanaan kegiatan tersebut
5. Sarana/fasilitas perlengkapan pendukung kegiatan yang memadai

e. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.94
Efesiensi Pengguna Sumber Daya sasaran 20

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efesiensi
Meningkatkan keamanan dan ketertiban serta kualitas kehidupan sosial masyarakat yang religius dan berbudaya	Angka Kriminalitas	84	93	9

Anggaran yang ditetapkan pada tahun 2021 untuk mendukung pencapaian sasaran ini pada indikator Angka Kriminalitas yang Tterdiri dari 5 program sebesar Rp.22.845.507.500,- dengan realisasi sebesar Rp.21.229.758.952,- atau 93%. Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini sebesar 84%, berarti tingkat efesiensi yang mendukung indikator ini adalah sebesar 9%.

f. Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
2. Program Pencegahan, penanggulangan , Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
3. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan kualitas Dan Fasilitasi penangan konflik Sosial.
4. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
5. Program Pemerintah dan kesejahteraan Rakyat



Sasaran 21 : Meningkatnya Kenyamanan Kehidupan Bermasyarakat

- a. Perbandingan antar target dan realisasi kinerja tahun ini.

Tabel 3.95
Target Capaian Indikator Kinerja sasaran 21

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)
		Target	Realisasi	
1 Angka Kriminalitas yang Tertangani	Persen	73,80	72,00	97

Sumber data : Bappelitbangda Kab.Sidrap

Pengukuran capaian Indikator kinerja pada sasaran ini menunjukkan realisasi sebesar 72,00 dari target 73,80 dengan capaian kinerja yaitu sebesar 97% atau dengan kriteria **Sangat Tinggi**.

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.96
Perkembangan Pencapaian Sasaran Strategis 21

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi			Capaian (%)		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
1 Angka Kriminalitas yang Tertangani	%	73,63	59,95	72.00	-	-	97

Sumber data : Bappelitbangda Kab.Sidrap

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sasaran Stretgis 20 Meningkatnya Kenyamanan Kehidupan Bermasyarakat pada Indikator ini di Tahun 2019-2020 belum ada penetapan indikator besaran satuan sehingga belum ada realisasi dan capaian indikator. Sedangkan untuk tahun 2021 realisasi indikator sebesar 72.00% dengan capaian sebesar 97%.

- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.



Tabel 3.97
Perbandingan Target Realisasi
sasaran 20 Angka Kriminalitas yang Tertangani

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Sampai dengan Tahun ini	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah
Angka Kriminalitas yang Tertangani	%	72.00	76,11

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini sebesar 72.00% sedangkan target untuk jangka menengah sebesar 76.11% perbandingan realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2021 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tersebut belum mencapai target.

d. Analisis Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

- Persentase Warga yang memperoleh layanan akibat dari penegakan Hukum Perda
- Persentase warga yang memperoleh penyelamatan dan Evakuasi korban
- Persentase koordinasi pimpinan daerah dan tim dalam rangka cegah dan deteksi dini konflik dalam daerah

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.98
Efisiensi Pengguna Sumber Daya sasaran 21

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Kenyamanan Kehidupan Bermasyarakat	Angka Kriminalitas yang Tertangani	97	93	4

Anggaran yang ditetapkan pada tahun 2021 untuk mendukung pencapaian sasaran ini pada indikator pertama terdiri dari 5 program sebesar Rp.22.845.507.500, dengan realisasi sebesar Rp.21.229.578.952,- atau 93%. Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini sebesar 97%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung indikator ini adalah sebesar 4%.

f. Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan



1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
2. Program Pencegahan, penanggulangan , Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
3. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan kualitas Dan Fasilitasi penangan konflik Sosial.
4. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
5. Program Pemerintah dan kesejahteraan Rakyat

3.3 REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mendukung terwujudnya pencapaian kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dalam rangka menunjang tercapainya sasaran strategis dan indikator kinerja Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 dapat dilihat padatabel berikut

Tabel.3.99
REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

No.	Program/Kegiatan	Anggaran(Rp)	Realisasi(Rp)	Persentase %
1.	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA(IPM)	216.786.485.765	96.939.613.184	95
2.	INDEKS PENDIDIKAN	98.865.744.787	96.939.613.184	98
-	Program Pengelolah Pendidikan	91.071.765.787,-	89.364.934.184,-	98
-	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	7.793.979.000,-	7.574.679.000,-	97
3.	INDEKS KESEHATAN	17.920.740.978	5.792.853.912	92
-	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	71,267,177,880	65,659,348,912	92%
-	Program Peningkatan Kapasitas Sumber	169,476,000	133,505,000	79%



	Daya Manusia Kesehatan			
-	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	347,479,000	341,479,000	98%
4. INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG)		<i>97.059.000</i>	<i>96.932.000</i>	<i>100</i>
-	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	97.059.000,-	96.932.000,-	100
-	Program Perlindungan Perempuan	-	-	-
5. PDRB PERKAPITA AHB		<i>25.896.355.300</i>	<i>24.398.200.837</i>	<i>94</i>
-	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	3.571.203.000,-	3.357.949.562,-	94
-	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	7.496.654.300,-	7.368.059.300,-	98
-	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	175.705.000	116.377.900	66
-	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.262.042.000	1.085.518.775	86
-	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	277.277.500	258.968.200	93
-	Program penyuluh Pertanian	4.632.915.000	4.109.531.050	89
-	Program Pengembangan UMKM	5.950.181.000	5.940.805.050	100
-	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	2.530.377.500	2.160.991.000	85
6. PERTUMBUHAN EKONOMI		<i>25.896.355.300</i>	<i>24.398.200.837</i>	<i>94</i>



-	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	3.571.203.000,-	3.357.949.562,-	94
-	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	7.496.654.300,-	7.368.059.300,-	98
-	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	175.705.000	116.377.900	66
-	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.262.042.000	1.085.518.775	86
-	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	277.277.500	258.968.200	93
-	Program penyuluh Pertanian	4.632.915.000	4.109.531.050	89
-	Program Pengembangan UMKM	5.950.181.000	5.940.805.050	100
-	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	2.530.377.500	2.160.991.000	85
7. TINGKAT KEMISKINAN		4.034.244.000	3.591.893.483	89
-	Program Pemberdayaan Sosial	825.760.000	789.105.400,-	96
-	Program Rehabilitas Sosial	738.234.000,-	720.597.799	98
-	Program Perlindungan dan jaminan Sosial	504.808.000	497.417.470	99
-	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	1.931.016.000	1.558.331.264	81
-	Program Pengelolahaan Sistem informasi Industri Nasional	34.426.000	26.441.550	77
8. GINI RATIO		1.309.146.800	1.306.991.200	100



-	Program Penanganan Bencana	200.511.000,-	198.490.400,-	99
-	Program Hubungan Industri	1.049.452.800,-	1.049.332.800,-	100
-	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Mikro (UMKM)	59.183.000,-	59.168.000,-	100
9. TINGKAT PENGGANGGURAN TERBUKA(TPT)		1.100.473.000	1.100.443.000	100
-	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.100.473.000,-	1.100.443.000	100
10. NILAI INVESTASI		5.223.147.403	4.818.418.313	92
-	Program Promosi Penanaman Modal	35.880.000,-	32.265.500	90
-	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	4.848.765.403,-	4.453.008.813,-	92
-	Program Pemasaran Pariwisata	338.502.000,-	333.144.000,-	98
11. PERTUMBUHAN PDRB SEKTOR PENGADAAN AIR, PENGELOHAAN SAMPAH DAN DAUR ULANG, TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN, SERTA KONSTRUKSI (ADHK)		40.668.650.579	20.987.344.885	52
-	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	24,242,750,579	20,987,344,885	87%
-	Program Pengolahan dan Pengembangan Sistem Drainase	1,638,820,000	1,623,559,100	99%
-	Program Penataan Bangunan Gedung	18,363,870,000	17,205,498,434	94%



12. INDEKS LAYANAN INFRASTRUKTUR		<i>78,186,437,000</i>	<i>77,546,126,195</i>	<i>99%</i>
-	Program Penyelenggaraan Jalan	67,789,992,000	67,331,585,650	99%
-	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	2,154,320,000	2,123,591,000	99%
-	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	4,867,803,000	4,716,627,545	97%
-	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	3,374,322,000	3,374,322,000	100%
13. INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH)		<i>10,091,987,000</i>	<i>8,948,348,308</i>	<i>89%</i>
-	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	153,203,000	145,442,200	95%
-	Program Pengelolaan keanekaragaman Hayati (Kehati)	2,962,866,000	2,815,487,208	95%
-	Program Pengelolaan Persampahan	6,975,918,000	5,987,418,900	86%
14. INDEKS REFORMASI BIROKRASI		<i>5.019.242.400</i>	<i>4,270,083,405</i>	<i>85%</i>
-	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	911,156,800	826,706,175	91%
-	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	581,501,200	558,422,830	96%
-	Program Penyelenggaraan Pengawasan	953,220,000	945,740,000	99%



-	Program Pelayanan Penanaman Modal	223,329,400	193,005,500	86%
-	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	200,000,000	47,050,000	24%
-	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	-
-	Program Aplikasi Informatika	2,150,035,000	1,699,158,900	79%
14. NILAI SAKIP		2.445.878.000	2.330.869.005	95
-	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	911.156.800,-	826.706.175,-	91
-	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	581.501.200,-	558.422.830,-	96
-	Program Penyelenggaraan Pengawasan	953.220.000,-	945.740.000	99
15. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT(IKM)		423.329.400	240.055.500	57
-	Program Pelayanan Penanaman Modal	223.329.400,-	193.005.500,-	86
-	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	200.000.000	47.050.000	24
-	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	-
16. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT		423,329,400	240,055,500	57%



(IKM)				
-	Program Pelayanan Penanaman Modal	223,329,400	193,005,500	86%
-	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	200,000,000	47,050,000	24%
-	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	-
17. INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)		2,150,035,000	1,699,158,900	79%
-	Program Aplikasi Informatika	2,150,035,000	1,699,158,900	79%
18. INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM)		2,074,960,000	483,597,567	23%
-	Program Penataan Desa	5,210,000	4,921,615	94%
-	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	524,227,600	478,675,952	91%
19. PERSENTASE DESA MAJU DAN MANDIRI		15,243,629,400	13,648,899,980	90%
-	Program Administrasi Pemerintahan Desa	570,114,400	526,855,600	92%
-	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	14,673,515,000	13,122,044,380	89%
20. ANGKA KRIMINALITAS		22,845,507,500	21,229,578,952	93%



21. ANGKA KRIMINALITAS YANG TERTANGANI		22,845,507,500	21,229,578,952	93%
-	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	2,208,953,000	2,108,039,850	95%
-	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	2,734,650,200	2,720,249,000	99%
-	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	730,332,000	727,802,000	100%
-	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	6,089,465,100	5,791,688,302	95%
-	Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	11,082,107,200	9,881,799,800	89%

3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN 2021

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2021, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 1,200,300,871,326.39,- . Berpedoman pada proyeksi indikator makro ekonomi dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, maka strategi - strategi kebijakan fiskal sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 – 2023 diarahkan kepada:

1. Meningkatkan sumber penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah dan Bagi Hasil Pajak yang lebih rasional dan proporsional;
2. Meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD dari sisi belanja;
3. Mengoptimalkan peningkatan penerimaan daerah yang bersumber dari sumber - sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan;
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta, baik dalam pembiayaan



maupun pelaksanaan pembangunan.

Upaya-upaya efektif dalam penggalian sumber - sumber pendapatan daerah harus terus dilakukan tanpa harus menambah beban bagi masyarakat sehingga nantinya pendapatan daerah tidak lagi harus bergantung pada satu atau dua jenis pajak daerah saja, diversifikasi sumber pendapatan daerah menjadi mutlak dicari agar ketergantungan dan resiko dapat disebar, mengingat struktur ekonomi lebih banyak di dominasi oleh sektor primer, maka sudah saatnya dirancang berbagai tindakan yang dapat menggali sumber- sumber pendapatan daerah yang berbasiskan pada sektor primer dan mata rantainya. Pendapatan Daerah dikelompokkan kedalam Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain – Lain Pendapatan Yang Sah yang masing - masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparatur maupun pelayanan kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut:



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

NO	URAIAN	REF	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	REALISASI 2020	REALISASI 2019
1	PENDAPATAN – LRA	7.5.1.1					
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LRA	7.5.1.1.a					
3	Pendapatan Pajak Daerah – LRA	7.5.1.1.a.1)	43,400,558,000.00	46,044,498,994.00	106.09	38,266,172,724.00	33,619,377,007.00
4	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	7.5.1.1.a.2)	28,549,525,500.00	22,001,799,021.00	77.07	11,824,796,144.00	15,930,939,732.00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	7.5.1.1.a.3)	5,000,000,000.00	4,215,501,598.00	84.31	4,276,625,449.00	4,711,090,062.00
6	Lain-lain PAD Yang Sah – LRA	7.5.1.1.a.4)	82,684,000,000.00	64,512,591,144.39	78.02	78,583,720,448.71	71,472,677,124.72
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA		159,634,083,500.00	136,774,390,757.39	85.68	132,951,314,765.71	125,734,083,925.72
8	PENDAPATAN TRANSFER – LRA	7.5.1.1.b					
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA						
10	Bagi Hasil Pajak – LRA	7.5.1.1.b.1)	10,097,069,000.00	15,997,154,746.00	158.43	11,126,704,478.00	10,110,550,637.00
11	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LRA	7.5.1.1.b.2)	4,993,469,000.00	7,438,013,156.00	148.95	4,842,543,095.00	5,039,265,719.00
12	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	7.5.1.1.b.3)	575,549,310,000.00	575,549,310,000.00	100.00	585,992,758,000.00	649,569,016,000.00
13	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	7.5.1.1.b.4)	287,459,991,000.00	267,007,590,029.00	92.89	222,781,451,963.00	273,352,555,073.00
14	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –LRA		878,099,839,000.00	865,992,067,931.00	98.62	824,743,457,536.00	938,071,387,429.00
15	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LRA						
16	Dana Penyesuaian – LRA	7.5.1.1.b.5)	21,883,939,000.00	21,883,939,000.00	100.00	31,409,880,000.00	65,498,274,000.00
17	Jumlah Dana Penyesuaian -LRA		21,883,939,000.00	21,883,939,000.00	100.00	31,409,880,000.00	65,498,274,000.00



18	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LRA						
19	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	7.5.1.1.b.6)	70,761,840,000.00	55,247,911,676.00	78.08	42,946,362,580.00	46,897,390,170.00
20	Pendapatan Bagi hasil Lainnya - LRA	7.5.1.1.b.7)	0.00	0.00	0.00	14,433,202,193.87	15,139,967,593.84
21	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LRA		70,761,840,000.00	55,247,911,676.00	78.08	57,379,564,773.87	62,037,357,763.84
22	Total Pendapatan Transfer - LRA		970,745,618,000.00	943,123,918,607.00	97.15	913,532,902,309.87	1,065,607,019,192.84
23	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LRA	7.5.1.1.c					
24	Pendapatan Hibah – LRA	7.5.1.1.c.1)	55,676,076,000.00	48,674,533,762.00	87.42	58,074,331,612.00	35,690,697,074.00
25	Pendapatan Lainnya – LRA	7.5.1.1.c.2)	72,713,321,000.00	71,728,028,200.00	98.64	82,177,940,168.00	8,827,331,500.00
26	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA		128,389,397,000.00	120,402,561,962.00	93.78	140,252,271,780.00	44,518,028,574.00
27	JUMLAH PENDAPATAN - LRA		1,258,769,098,500.00	1,200,300,871,326.39	95.36	1,186,736,488,855.58	1,235,859,131,692.56
28							
29	BELANJA	7.5.1.2					
30	BELANJA OPERASI	7.5.1.2.a					
31	Belanja Pegawai	7.5.1.2.a.1)	497,399,712,700.64	479,422,031,220.00	96.39	526,228,949,601.15	509,339,372,946.00
32	Belanja Barang dan Jasa	7.5.1.2.a.2)	335,290,336,383.00	297,178,079,664.00	88.63	242,939,699,081.32	253,352,397,279.00
33	Belanja Bunga	7.5.1.2.a.3)	1,050,000,000.00	821,276,863.00	78.22	1,002,682,639.00	1,296,714,918.00
34	Belanja Subsidi	7.5.1.2.a.4)	0.00	0.00		0.00	0.00
35	Belanja Hibah	7.5.1.2.a.5)	35,355,642,352.00	31,396,754,689.00	88.80	43,424,456,200.00	54,744,622,818.00
36	Belanja Bantuan Sosial	7.5.1.2.a.6)	29,973,000.00	29,973,000.00	100.00	0.00	1,592,500,000.00
37	Jumlah Belanja Operasi		869,125,664,435.64	808,848,115,436.00	93.06	813,595,787,521.47	820,325,607,961.00
38	BELANJA MODAL	7.5.1.2.b					
39	Belanja Modal Tanah	7.5.1.2.b.1)	2,100,000,000.00	2,097,867,200.00	99.90	2,653,632,800.00	2,413,571,600.00
40	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.5.1.2.b.2)	58,967,085,460.00	54,433,049,519.00	92.31	25,884,452,130.00	28,458,776,738.00
41	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.5.1.2.b.3)	112,584,137,037.00	107,194,477,171.00	95.21	89,336,103,713.00	111,699,662,116.00
42	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.5.1.2.b.4)	99,396,453,479.00	96,322,624,950.76	96.91	111,822,903,367.45	113,482,438,604.86



43	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.5.1.2.b.5)	248,000,000.00	245,948,000.00	99.17	3,826,392,972.00	6,391,659,724.00
44	Jumlah Belanja Modal		273,295,675,976.00	260,293,966,840.76	95.24	233,523,484,982.45	262,446,108,782.86
45	BELANJA TAK TERDUGA	7.5.1.2.c					
46	Belanja Tak Terduga	7.5.1.2.c.1)	3,000,000,000.00	909,670,000.00	30.32	10,508,277,642.00	2,352,483,350.00
47	Jumlah Belanja Tak Terduga		3,000,000,000.00	909,670,000.00	30.32	10,508,277,642.00	2,352,483,350.00
48	JUMLAH BELANJA		1,145,421,340,411.64	1,070,051,752,276.76	93.42	1,057,627,550,145.92	1,085,124,200,093.86
49							
50	TRANSFER	7.5.1.2.d					
51	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN						
52	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	7.5.1.2.d.1	0.00	-		-	-
53	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	7.5.1.2.d.2	2,966,114,000.00	-	-	5,506,800.00	0.00
54	Jumlah Bagi Hasil Pendapatan		2,966,114,000.00	-	-	5,506,800.00	0.00
55	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN						
56	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	7.5.1.2.d.3	131,224,241,062.00	128,851,307,154.00	98.19	125,615,666,278.00	137,675,053,962.00
57	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	7.5.1.2.d.4	0.00	0.00		863,820,313.00	643,851,126.00
58	Jumlah Transfer Bantuan Keuangan		131,224,241,062.00	128,851,307,154.00	98.19	126,479,486,591.00	138,318,905,088.00
59	JUMLAH TRANSFER		134,190,355,062.00	128,851,307,154.00	96.02	126,484,993,391.00	138,318,905,088.00
60							
61	SURPLUS / (DEFISIT)	7.5.1.2.e	(20,842,596,973.64)	1,397,811,895.63	(6.71)	2,623,945,318.66	12,416,026,510.70
62							
63	PEMBIAYAAN	7.5.1.3					
64	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	7.5.1.3.a					
65	Penggunaan SilPA	7.5.1.3.a	23,138,064,723.64	23,138,064,723.64	100.00	24,642,738,152.98	14,836,521,870.28
66	Jumlah Penerimaan Pembiayaan		23,138,064,723.64	23,138,064,723.64	100.00	24,642,738,152.98	14,836,521,870.28
67	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.5.1.3.b					
68	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	7.5.1.3.b.1)	0.00	0.00	0.00	1,800,000,000.00	919,000,000.00



69	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	7.5.1.3.b.2)	2,295,467,750.00	2,274,086,498.00	99.07	2,274,086,498.00	2,274,086,498.00
70	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		2,295,467,750.00	2,274,086,498.00	99.07	4,074,086,498.00	3,193,086,498.00
71							
72	PEMBIAYAAN NETTO		20,842,596,973.64	20,863,978,225.64	100.10	20,568,651,654.98	11,643,435,372.28
73							
74	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	7.5.1.4	(0.00)	22,261,790,121.27	-	23,192,596,973.64	24,059,461,882.98
75	KOREKSI SILPA	7.5.1.4		0.00		(54,532,250.00)	
76	SILPA SETELAH KOREKSI	7.5.1.4		22,261,790,121.27		23,138,064,723.64	

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang



BAB IV PENUTUP

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021, dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran – sasaran strategisnya. Hasil analisis pencapaian Pengukuran Kinerja terhadap 21 (dua puluh satu) Sasaran Strategis dan 21 (dua puluh d) Indikator Kinerja Utama,

Hampir keseluruhan indikator dapat terukur, sehingga kinerja penetapan indikator untuk tahun 2021 telah dapat dibandingkan dengan tahun lalu.

Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi Pemerintah ditingkatkan untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.

Dalam rangka perbaikan system monitoring, evaluasi, pengendalian capaian kinerja dan pelaporan kinerja, maka upaya pengembangan terhadap e-Sakip perlu terus dilakukan terutama berkaitan dengan penambahan fitur dan aplikasi baru yang mampu meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja di masa yang akan datang.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapaindikator yang dicantumkan dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 - 2023 khususnya untuk Tahun Anggaran 2021, belum mencapai target. Masih terdapat indikator sasaran strategis yang belum memenuhi target yang telah ditetapkan, akan terus kami upayakan melalui kerja keras secara sinergi, inovasi dan kolaborasi bersama masyarakat dan semua pihak.

Pangkajene Sidenreng, 10 Maret 2022

BUPATI SIDENRENG RAPPANG


H. DOLLAH MANDO



Lampiran



PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Kualitas SDM yang Inklusif dan berdaya saing	1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	71,37	71.54	100
2	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan.	2	Indeks Pendidikan.	Indeks	62.54	62.44	99
3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.	3	Indeks Kesehatan.	Indeks	76,85	76,94	100
4	Meningkatnya Keberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan	4	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	57,67	33.21	58
5	Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	5	PDRB Perkapita AHB	Juta Rupiah	46,49	47.19	102
6	Meningkatnya Produktifitas Sektor-Sektor Perekonomian	6	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3,38-4,51	5.54	123
7	Menurunnya Angka Kemiskinan	7	Tingkat Kemiskinan	Persen	5,01	5.04	100
8	Menurunnya Ketimpangan Distribusi Pendapatan	8	Gini Ratio	Point	0,342	0.358	105
9	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	9	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,88	4.93	84
10	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan Daya Saing Daerah	10	Nilai Investasi	Triliun Rp.	3.615,32	335.572.253.290	9.28
11	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan	11	Pertumbuhan PDRB Sektor Pengadaan Sampah dan Daur Ulang, Transportasi dan Pergudangan, serta Konstruksi (ADHK)	Persen	2,00-3,91	6.29	161
12	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.	12	Indeks Layanan Infrastruktur	Indeks	71,89	76.23	106
13	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	66,26	65.01	98
14	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan	14	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	53,08 (CC)	47.12 (C)	89



	Pemerintah dan Pelayanan Publik						
15	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	15	Nilai SAKIP	Point	65,19 (B)	60.03 (B)	92
16	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	16	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	80,14 (B)	78,31	98
17	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	17	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,20	1.78	81
18	Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	18	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,7278	0.7278	100
19	Terwujudnya Desa Maju dan Mandiri	19	Persentase Desa maju dan mandiri (IDM)	Persen	67,47	70.59	105
20	Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	20	Angka Kriminalitas	Kasus	355	400	113
21	Meningkatnya Kenyamanan Kehidupan Bermasyarakat	21	Angka Kriminalitas Tertangani	Persen	73.8	72.00	97



RENCANA KINERJA TAHUN 2022 KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas SDM yang Inklusif dan berdaya saing	1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	71,73
2	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan.	2	Indeks Pendidikan.	Indeks	63.01
3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.	3	Indeks Kesehatan.	Indeks	77.27
4	Meningkatnya Keberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan	4	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	58.84
5	Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	5	PDRB Perkapita AHB	Juta Rupiah	48.76
6	Meningkatnya Produktifitas Sektor-Sektor Perekonomian	6	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4.39-5.86
7	Menurunnya Angka Kemiskinan	7	Tingkat Kemiskinan	Persen	4.83
8	Menurunnya Ketimpangan Distribusi Pendapatan	8	Gini Ratio	Point	0.335
9	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	9	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,76
10	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan Daya Saing Daerah	10	Nilai Investasi	Triliun Rp.	3.780.68
11	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan	11	Pertumbuhan PDRB Sektor Pengadaan Sampah dan Daur Ulang, Transportasi dan Pergudangan, serta Konstruksi (ADHK)	Persen	3.91-581
12	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.	12	Indeks Layanan Infrastruktur	Indeks	74.55
13	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	66,91
14	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	14	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	62.87 (B)
15	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	15	Nilai SAKIP	Point	71.46(BB)
16	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	16	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	84.32(B)
17	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	17	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,38



18	Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	18	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,7278
19	Terwujudnya Desa Maju dan Mandiri	19	Persentase Desa maju dan mandiri (IDM)	Persen	75.00
20	Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	20	Angka Kriminalitas	Kasus	347
21	Meningkatnya Kenyamanan Kehidupan Bermasyarakat	21	Angka Kriminalitas Tertangani	Persen	74.93



NO	HARI TANGGAL	NAMA PENGHARGAAN	ASAL PENGHARGAAN	OPD TERKAIT
1.	Rabu, 06/01/2021	Penghargaan Pemkab Sidrap dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsotek) atas apresiasi atas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan	BPJS KETENAGAKERJAAN	Pemkab Sidrap
2.	Rabu, 06/01/2021	Penghargaan Dinas Koperasi ,UKM Nakertrans Sidrap dari BPJamsostek atas Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Honorer /Tenaga Sosial/ Non ASN Kabupaten Sidrap	BPJS KETENAGAKERJAAN	Dinas Koperasi
3.	Rabu, 06/01/2021	Penghargaan Dinas Koperasi ,UKM Nakertrans Sidrap dari BPJamsostek atas Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepada Iman Mesjid se-Kabupaten Sidrap	BPJS KETENAGAKERJAAN	Dinas Koperasi
4.	Rabu, 20/01/2021	Penghargaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Sidrap dari Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sulsel atas Kesuksesan mengawal pengiriman data mutu pendidikan	LPMP	Dinas pendidikan
5.	Selasa, 16/02/2021	Penghargaan Pemkab Sidrap dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas prestasi pencapaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	BPKP	Pemkab Sidrap
6.	Selasa, 16/02/2021	Penghargaan Inspektorat Sidrap dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas pencapaian Kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) Level 3	Inspektorat	BPKP
7.	Kamis, 08/04/2021	Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tahun 2021.	Pemkab Sidrap	Pemkab Sidrap
8.	Jumat, 28/05/2021	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun Anggaran 2020	BPKP	BKAD
9.	Jumat, 18/6/2021	Penghargaan Pemkab Sidrap dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek) atas raihan nilai terbaik pada Paritran Award 2020 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan	BPJS KETENAGAKERJAAN	Pemkab Sidrap
10.	Kamis , 01/7/2021	Kabupaten terbaik di Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I tahun 2021	BPKP	BKAD
11.	Kamis , 29/7/2021	Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) Kategori Madya di tahun 2021		Pemdes
12.	Senin 06/11/2021	Penghargaan Top 30 KIPP (Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik) tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 atas Inovasi "Mbah Sijaka" RS Arifin Nu'mang	Kementerian Kesehatan RI	RS.A rifin nu'mang
13.	Senin 04/10/2021	Penghargaan TPAKD (Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah) dari dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional VI Sulawesi, Maluku, dan Papua atas inovasi fasilitasi akses keuangan berorientasi kluster UMKM tahun 2021	BPKP	BKAD



14.	Jumat 15/10/2021	Penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Berkelanjutan Tahun 2021 dari Kementerian Kesehatan RI,	Kementerian Kesehatan RI	Dinas Kesehatan
15.	selasa, 26/10/2021	Plakat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 5 Tahun Berturut-turut dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia	BPKP	
16.	selasa, 26/10/2021	Piagam penghargaan atas opini WTP tahun 2020 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia	BPKP	BKAD
17.	Sabtu 30/10/2021	Fajar Award kepada Bupati Sidenreng Rappang dari Media Harian Fajar atas inovasi Penguatan Infrastruktur Pedesaan	Media Harian fajar	Pemkab Sidrap
18.	Jumat 5/11/2021	Nobel Indonesia Education Award kepada Bupati Sidrap dari Nobel Indonesia Institut sebagai sosok yang memiliki peran dan pengaruh besar terhadap pengembangan pendidikan	Nobel	Pemkab Sidrap
19.	Jumat 24/12/2021	Penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2021 kepada SMAN 6 Sidrap dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia	SMAN 6 Sidrap	Lingkungan hidup



**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
BAGIAN ORGANISASI
SUB BAGIAN REFORMASI BIROKRASI DAN KINERJA SETDA**

Nomor SOP	
Tgl Pembuatan	06 September 2018
Tgl Revisi	
Tgl Efektif	
Disahkan oleh	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  SUDIRMAN BUNGI, S.IP, M.Si Nip.19700827 199009 1 002
Nama SOP	PENGUMPULAN DATA KINERJA

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Propinsip dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisas Perangkat Daerah 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Organisasi Perangkat Daerah	1. Menguasai alur persuratan 2. Mampu mengklasifikasikan surat menurut jenisnya 3. Sarjana Hukum
Keterkaitan	Peralatan Perlengkapan
1. SOP Pembuatan LAKIP 2. SOP Fasilitasi Pelaksanaan Rapat Tim 3. 4.	1. Buku Agenda 2. Ekspedisi 3. Lembar Disposisi
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Bila penyusunan tidak dilaksanakan, maka data laporan kinerja tidak dapat disajikan dengan baik	



Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
	Tim LAKIP	kabag	Kasubbag	Staf Sub Bagian	Kelengkapan	Waktu	Output	
1. Memerintahkan Kasubag untuk melaksanakan pengumpulan data kinerja Sekretariat Daerah					Peraturan yang ada	5 menit	Perintah	
1. Mebuat surat permintaan data kinerja .					Bahan-bahan / materi sesuai Peraturan yang ada	30 menit	Tersedia kelengkapan yang akan digunakan dan dijadikan pedoman dalam pengumpulan bahan/materi	
2. Mengirim surat permintaan data kinerja.					Bahan-bahan / materi sesuai Peraturan yang ada	15 menit	Bahan/materi telah selesai dan siap dibagikan Tim penyusunan lakip	
3. Menerima dan mengumpulkan data kinerja dari masing-masing bagian.					Daftar bahan/Materi Pulpen.	120 menit	Bahan/materi telah tersedia	
4. Memeriksa, merekap data yang diterima untuk di olah menjadi laporan Kinerja					Bahan/materi	15 menit	Laporan kinerja Siap untuk disusun	

